

**DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 73 TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBAYARAN DIVIDEN KAS DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI PADA SUBSEKTOR RITEL YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh:

**YESI ANGRAINI
NPM 2211031049**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 73 TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBAYARAN DIVIDEN KAS DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI PADA SUBSEKTOR RITEL YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh

YESI ANGRAINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 73 TERHADAP KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN KAS DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA SUBSEKTOR RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

YESI ANGRAINI

Penelitian ini menganalisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas dengan *leverage* sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan subsektor ritel di Bursa Efek Indonesia. PSAK 73 yang efektif sejak 1 Januari 2020 mengubah perlakuan akuntansi sewa menjadi *on balance sheet*, sehingga berpotensi memengaruhi keputusan dividen. Menggunakan data sekunder dari 21 perusahaan periode 2020-2024 (105 observasi), analisis dilakukan dengan regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Implementasi PSAK 73 diproksikan dengan liabilitas sewa, dividen dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR), dan *leverage* dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Hasil penelitian menunjukkan implementasi PSAK 73 berpengaruh negatif signifikan terhadap dividen kas ($p\text{-value } 0,001 < 0,05$), mengindikasikan peningkatan liabilitas sewa mendorong manajemen mengurangi dividen demi stabilitas keuangan. *Leverage* ditemukan memoderasi hubungan tersebut ($p\text{-value } 0,029 < 0,05$) dengan arah koefisien positif yang memperlemah pengaruh negatif implementasi PSAK 73 terhadap dividen kas. Secara empiris, temuan ini mendukung *Pecking Order Theory* dan *Agency Theory*, bahwa perusahaan memprioritaskan pendanaan internal serta menunjukkan bagaimana liabilitas sewa memitigasi masalah agensi. Penelitian ini berkontribusi memperluas pemahaman dampak perubahan standar akuntansi PSAK 73 tentang sewa terhadap pengambilan kebijakan pembayaran dividen kas pada perusahaan subsektor ritel yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

Kata kunci: PSAK 73, Kebijakan Pembayaran Dividen, *Leverage*

ABSTRACT

THE IMPACT OF PSAK NO. 73 IMPLEMENTATION ON DIVIDEND PAYOUT WITH LEVERAGE AS A MODERATING VARIABLE IN RETAIL SUBSECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

By

YESI ANGRAINI

This study analyzes the impact of PSAK 73 implementation on dividend payout with leverage as a moderating variable in Indonesia Stock Exchange (IDX) retail companies. PSAK 73, effective since January 2020, transformed lease accounting to an on balance sheet treatment, potentially affecting dividend decisions. Secondary data from 21 retail companies (2020-2024) yielded 105 observations, analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). PSAK 73 was proxied by lease liability, dividend payout by Dividend Payout Ratio (DPR), and leverage by Debt to Equity Ratio (DER). Results indicate that PSAK 73 implementation has a significant negative effect on dividend payout (p -value = 0.001), suggesting that increased lease liabilities prompt management to reduce dividends to maintain financial stability. Leverage significantly moderates this relationship (p -value = 0.029 < 0.05), with a positive coefficient that weakens the negative effect of PSAK 73 implementation on cash dividends. Empirically, these findings support Pecking Order and Agency Theories, where companies prioritize internal funding and use lease liabilities to mitigate agency problems. This study contributes to broadening the understanding of the impact of the PSAK 73 lease accounting standard change on cash dividend policies in retail subsector companies listed on the IDX from 2020-2024.

Keywords: *PSAK 73, Dividend Payout, Leverage*

Judul Skripsi : **DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 73 TERHADAP KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN KAS DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA SUBSEKTOR RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Yesi Angraini*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2211031049**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., AKT., CA.
NIP. 19790721 200312 2002

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

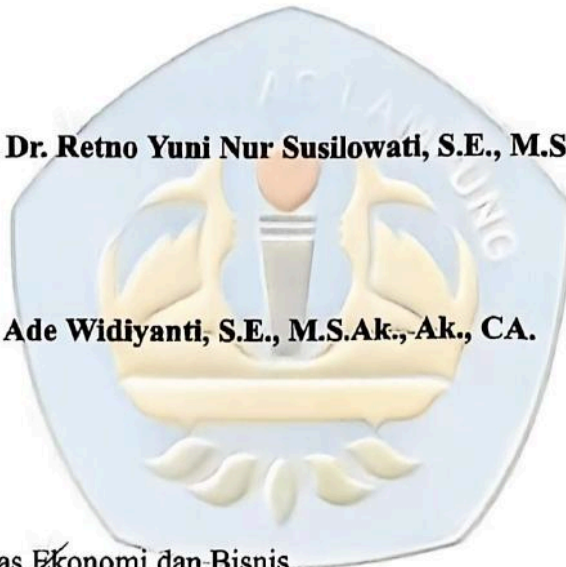
Ketua : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., AKT., CA.**



Penguji Utama: **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Penguji Kedua: **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 April 2026**

SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesi Angraini

NMP : 2211031049

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam karya ilmiah yang berjudul “Dampak Implementasi PSAK Nomor 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas dengan *Leverage* sebagai Variabel Pemoderasi pada Subsektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” ini adalah hasil kerja saya sendiri, yang berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang telah saya dapatkan. Karya ilmiah ini tidak berisi material yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dengan kata lain bukanlah hasil plagiat karya orang lain. Demikianlah pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Penulis



Yesi Angraini

NPM 2211031049

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Yesi Angraini, lahir di Liwa, Lampung Barat pada tanggal 22 Agustus 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Empulau Ulu pada tahun 2016, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun tersebut penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis bergabung dalam organisasi tingkat universitas. Penulis bergabung dalam organisasi *Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales* (AIESEC) in Unila dan *Society of Renewable Energy* (SRE) Unila. Selain itu, penulis juga aktif berpartisipasi dalam program magang Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya ini untuk keluarga tercinta. Tanpa dukungan, cinta, dan pengorbanan kalian yang luar biasa, aku tidak akan mungkin sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi alasan bagiku untuk tetap berjuang. Segala lelah yang tak terlihat selalu menjadi rahasia rasa yang perlahan menguatkan tekad untuk melangkah lebih jauh lagi. Lebih dari sekadar tugas akhir, lembaran ini adalah saksi atas segala pengorbanan yang diberikan orang-orang terkasih untukku. Semoga persembahan ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasihku yang takkan pernah cukup untuk membalas semua yang telah kalian berikan. Terimakasih yang teramat besar untuk rumah yang selalu menerimaku pulang sebentar, dalam rupa apa pun.

MOTTO

Allah SWT. tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, namun Allah SWT.
berjanji bahwa:

Fa inna ma'al-'usri yusrā. Inna ma'al-'usri yusrā.

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Berprogreslah setiap hari, sekecil apapun progresnya. Jika hari ini terasa belum
baik, mungkin itu langkah progres yang harus dilalui untuk menjadi lebih baik
esok hari”.

Unknown

“Jangan mikirin orang lain sejauh apa, tapi pikirkan dirimu sendiri sudah sejauh
apa.”

Unknown

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilamin.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Implementasi PSAK Nomor 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas dengan *Leverage* sebagai Variabel Pemoderasi pada Subsektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kesulitan. Namun, berkat arahan dan bantuan dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih pada kesempatan ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. dan Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., AKT., CA. selaku dosen pembimbing yang dengan segala ketabahan dan ketulusannya telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, serta mendoakan penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses bimbingan sampai selesainya penulisan skripsi ini terdapat sikap, perkataan ataupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Ibu.

Penulis senantiasa mengharapkan doa restu Ibu, semoga ilmu yang telah Ibu berikan senantiasa menjadi berkah dan manfaat bagi penulis di masa depan.

4. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran dan masukan berharga guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses ujian berlangsung terdapat sikap, perkataan, maupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Ibu. Penulis senantiasa mengharapkan doa restu, semoga masukan dan ilmu yang Ibu berikan menjadi berkah serta bermanfaat bagi penulis di masa depan.
5. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku dosen pembahas kedua yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran dan masukan berharga guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses ujian berlangsung terdapat sikap, perkataan, maupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Ibu. Penulis senantiasa mengharapkan doa restu, semoga masukan dan ilmu yang Ibu berikan menjadi berkah serta bermanfaat bagi penulis di masa depan.
6. Ibu Syaharani Noer Fathia, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
9. Almarhumah Ibuku tercinta, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang Ibu berikan semasa hidup, akan selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah dan pencapaian penulis.

10. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih untuk untaian doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Mohon maaf jika sampai detik ini penulis belum bisa menjadi anak yang membanggakan, namun penulis akan terus berjuang untuk itu.
11. Kedua abangku tersayang, terimakasih banyak untuk semua pengorbanan, cinta, kasih sayang, kepercayaan dan penjagaan yang selalu diberikan kepada penulis sejak kecil. Maafkan jika hingga kini belum bisa menjadi adik yang membanggakan, namun skripsi ini adalah bukti kecil dari besarnya kepercayaan yang kalian titipkan kepada penulis.
12. Ngahku tersayang, terimakasih atas kasih sayang tulus dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
13. *My little angels*, Ibo dan Adek, terimakasih telah hadir ke dunia dan menjadi sumber kebahagiaan bagi penulis.
14. Sahabatku, *Audit Angel's* yang terdiri dari enam belas orang, terima kasih untuk semua kebaikan serta dukungan yang telah menemani perjalanan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
15. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang dan memberikan yang terbaik semampu yang kamu bisa. Meski masih ada celah dalam prosesmu, teruslah belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Tetaplah teguh mengejar mimpi-mimpi yang membuatmu merasa hidup, apa pun rintangan yang kelak menghadang. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan dan bantuan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kebaikan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Penulis



Yesi Angraini

NPM 2211031049

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Empiris.....	14
1.4.3 Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	16
2.1.2 Teori Urutan Pendanaan (<i>Pecking Order Theory</i>).....	18
2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang Sewa.....	19
2.3 Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	22
2.3.1 Pengertian dan Konsep Dividen Kas.....	22
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	23
2.4 Tingkat <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Pemoderasi.....	26
2.5 Dampak Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 Tentang Sewa Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
2.7 Kerangka Pemikiran.....	32
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	33
2.8.1 Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	33
2.8.2 Tingkat <i>Leverage</i> Perusahaan sebagai Pemoderasi Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
3.2.1 Populasi Penelitian.....	39
3.2.2 Sampel Penelitian.....	40
3.3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi.....	41
3.3.1 Variabel Independen.....	42
3.3.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73.....	42
3.3.2 Variabel Dependen.....	42
3.3.2.1 Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	42
3.3.3 Variabel Moderasi.....	43
3.3.3.1 Tingkat <i>Leverage</i>	43
3.3.4 Variabel Kontrol.....	44
3.3.4.1 Ukuran Perusahaan (SIZE).....	44
3.3.4.2 Profitabilitas (ROA).....	45
3.3.4.3 <i>Cash Flow from Operation</i> (CFO).....	45
3.3.4.4 Pertumbuhan (GROWTH).....	45
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	48
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	49
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	49
3.5.3 <i>Robust Standard Error</i> HC3.....	49
3.6 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	50
3.7 Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>).....	50
3.8 Uji Hipotesis.....	50
3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
3.8.2 Analisis <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	51
3.8.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	51
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	54
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	58
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	59
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.3 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	63
4.4 Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>).....	64
4.5 Pengujian Hipotesis.....	66
4.5.1 Analisis Regresi linear Berganda (Model 1/H1).....	66
4.5.2 Analisis <i>Moderated Regression Analysis</i> (Model 2/H2).....	68
4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	70
4.5.3.1 Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas (H1).....	70

4.5.3.2 Tingkat <i>Leverage</i> Perusahaan Sebagai Pemoderasi Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas (H2).....	71
4.6 Pembahasan.....	71
4.6.1 Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	71
4.6.2 Tingkat <i>Leverage</i> Perusahaan sebagai Pemoderasi Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	73
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	78
5.3 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Industri Terdampak oleh IFRS 16.....	6
2.1 Perbandingan PSAK 73 dan PSAK 30.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi.....	46
4.1 Pemilihan Sampel Penelitian.....	52
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.3 Hasil Uji Normalitas Model 1 (<i>Kolmogorov Smirnov</i>).....	58
4.4 Hasil Uji Normalitas Model 2 (<i>Kolmogorov Smirnov</i>).....	59
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Model 1.....	60
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Model 2.....	61
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1.....	62
4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2.....	62
4.9 Hasil Uji Kelayakan Model 1 (Uji F).....	63
4.10 Hasil Uji Kelayakan Model 2 (Uji F).....	64
4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>) Model 1.....	65
4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>) Model 2.....	65
4.13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (Model 1/H1).....	67
4.14 Hasil Analisis <i>Moderated Regression Analysis</i> (Model 2/H2).....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1.1 Grafik Peningkatan Aset, Liabilitas dan EBITDA Industri Ritel.....	7
1.2 Sepuluh Perusahaan dengan Dampak Tertinggi oleh PSAK 73.....	8
2.1 Alur Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas.....	29
2.2 Kerangka Pemikiran.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pada pedoman pelaporan sewa secara global bermula saat *International Accounting Standard Board* (IASB) menerbitkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 16 tentang *leases* pada tahun 2016 sebagai solusi atas kelemahan *International Accounting Standard* (IAS) 17 (IAI, 2017). Isu utama yang menjadi sorotan adalah adanya praktik *off balance sheet* yang menyebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan, sehingga sulit bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang akurat atas sewa dan liabilitas terkait sewa (IAI, 2017). Urgensi perubahan ini terlihat dari data IASB yang melaporkan bahwa mayoritas komitmen sewa global, yakni sekitar 85% dari US\$3.3 triliun, sebelumnya hanya tersembunyi dalam catatan atas laporan keuangan sebagai sewa operasional (Hoogervorst, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan liabilitas perusahaan tidak dilaporkan secara utuh, sehingga rasio utang tidak mencerminkan risiko keuangan yang sebenarnya (Park & Na, 2017).

Di Indonesia, standar akuntansi sewa mulanya berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 yang mengadopsi IAS 17. Merespon perubahan standar sewa global, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meresmikan draf eksposur PSAK 73 pada 18 September 2017 sebagai adopsi dari IFRS 16 (IAI, 2017). Selama masa transisi (2017-2020), perusahaan melakukan persiapan teknis sesuai draf eksposur PSAK 73 (Lampiran C), yang meliputi pemilihan metode transisi retrospektif (Paragraf C05), melakukan identifikasi ulang kontrak (Paragraf C03), serta menghitung nilai kini liabilitas sewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental agar

dapat disajikan secara *on balance sheet* pada 1 Januari 2020 (Paragraf C08). Standar sewa PSAK 73 resmi menggantikan PSAK 30 terhitung mulai 1 Januari 2020. Seiring dengan kebijakan sinkronisasi penomoran standar akuntansi di Indonesia yang mulai efektif terhitung per 1 Januari 2024, PSAK 73 kini beralih menjadi PSAK 116 tentang sewa, dengan ketentuan bahwa perubahan penomoran ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan yang berlaku (IAI, 2022).

Laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang relevan dan merepresentasikan kondisi perusahaan secara jujur. Dalam konteks sewa, seluruh pengguna aset dan liabilitas seharusnya diakui secara eksplisit pada laporan posisi keuangan (IASB, 2016). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan transparansi bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai struktur modal dan risiko perusahaan. Namun, aturan sewa sebelumnya (PSAK 30) menerapkan sewa operasi sebagai aktivitas *off balance sheet* yang tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sebagai aset dan liabilitas di dalam laporan posisi keuangan, melainkan diakui sebagai beban periodik dalam laporan laba rugi. Hal tersebut tidak mencerminkan aset dan liabilitas perusahaan yang sebenarnya. Praktik *off balance sheet* tersebut diduga memunculkan asimetri informasi. Tanpa pengakuan liabilitas sewa, rasio keuangan seperti *leverage* menjadi tampak lebih baik dari kenyataannya. Akibatnya, pemangku kepentingan berisiko mengambil keputusan yang tidak akurat karena adanya liabilitas yang tidak terungkap pada laporan posisi keuangan (IASB, 2016).

Untuk menanggapi kondisi tersebut, IASB mengembangkan pendekatan baru dalam akuntansi sewa yang mewajibkan penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa yang timbul dari kontrak sewa tersebut pada laporan posisi keuangan (*on balance sheet*). IASB menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut akan menghasilkan representasi yang lebih tepat atas aset dan liabilitas penyewa, bersama dengan pengungkapan yang ditingkatkan, informasi terkait *leverage* dan modal yang digunakan menjadi lebih transparan. Perubahan standar sewa menjadi *on balance sheet* ini diklaim meningkatkan keterbukaan informasi pada laporan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran lebih baik bahwa pengakuan

aset dan liabilitas untuk semua jenis sewa, pada dasarnya memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan perusahaan (IASB, 2016, hlm. 5).

Perbedaan mendasar antara PSAK 30 dan PSAK 73 terletak pada cara penyewa (*lessee*) melaporkan kontrak sewanya. Pada PSAK 30, sewa operasi diberlakukan secara *off balance sheet* sehingga perusahaan menempatkan sewa operasi yang diakui penyewa sebagai beban sewa yang dibebankan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, terlepas dari adanya dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati oleh penyewa (Laksana & Sudradjat, 2019). Sebaliknya, PSAK 73 mewajibkan pengakuan seluruh kontrak sewa sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan, kecuali untuk sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah (IAI, 2017). Pengukuran liabilitas ini menggunakan nilai kini dari pembayaran masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit sewa, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa apabila suku bunga implisit tidak dapat ditentukan (IAI, 2017). Akibatnya, praktik *off balance sheet* dihilangkan dan di laporan laba rugi, beban sewa yang sebelumnya dicatat sebagai *single line item* (biaya sewa) kini terbagi menjadi dua komponen yaitu beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan atas aset hak guna (IAI, 2017). Perusahaan kini akan mengakui pola beban biaya yang lebih besar di awal (*front loaded*) untuk sebagian besar sewa, meskipun biaya sewa tahunan yang dibayarkan jumlahnya tetap (KPMG, 2016).

Penerapan ketentuan kapitalisasi sewa mengubah perlakuan sewa operasi yang mulanya bersifat *off balance sheet* menjadi *on balance sheet*. Perubahan ini menyebabkan bertambahnya beberapa akun baru, yaitu akun aset hak guna dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan (IAI, 2017). Akun aset hak guna disusutkan secara sistematis selama masa sewa karena mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi atas hak penggunaan aset tersebut, sehingga muncul akun beban penyusutan atas aset hak guna. Selain itu, akun liabilitas sewa mengandung biaya bunga akibat pembayaran cicilan untuk melunasi utang yang harus dibayar di masa depan, sehingga muncul akun beban bunga atas liabilitas sewa. Beban

penyusutan dan beban bunga tersebut muncul di dalam laporan laba rugi perusahaan, yang berpotensi menekan laba bersih perusahaan.

Selain menekan laba bersih, jika dilihat dari sisi laporan arus kas, pembayaran sewa dipecah menjadi komponen pokok dan bunga. Bagian pokok dari pembayaran sewa diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas karena mengurangi liabilitas sewa, sementara bagian bunga diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi (Holloway & Singh, 2025; Stancheva-Todorova & Velinova-Sokolova, 2019). Penyajian tersebut bergeser untuk mencerminkan sifat pendanaan dari pelunasan pokok dan sifat operasi dari pembayaran bunga (Stancheva-Todorova & Velinova-Sokolova, 2019). Meskipun pergeseran klasifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan tekanan pada kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kas. Beban bunga dan penyusutan yang kini diakui secara eksplisit menekan laba bersih, sementara arus kas operasi yang terlihat meningkat secara pelaporan, tidak serta mencerminkan ketersediaan kas bebas yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Pendekatan standar akuntansi PSAK 73 ini meningkatkan kejelasan mengenai bagaimana liabilitas sewa memengaruhi likuiditas dan struktur pendanaan penyewa (Botiraliyeva, 2025; Holloway & Singh, 2025).

Terjadinya penekanan pada laba bersih dan *free cash flow* akibat kapitalisasi sewa tersebut dapat diperparah oleh tingkat *leverage* (DER) yang turut meningkat akibat munculnya akun liabilitas sewa. Kapitalisasi sewa tersebut kemungkinan akan berdampak material pada rasio seperti *leverage* yang meningkat secara signifikan (Benitto, 2025; Firaz dkk., 2022; Sabrina & Challen, 2023). *Leverage* ini berpotensi memengaruhi persepsi risiko keuangan perusahaan. Kondisi tersebut memposisikan manajer untuk memilih prioritas antara menahan laba untuk pelunasan liabilitas sewa atau untuk menjaga kelangsungan operasional dengan pemegang saham yang tetap mengharapkan distribusi dividen sebagai imbal hasil dari investasi (Hariyanti & Pangestuti, 2021; Uqba & Hindasah, 2025).

Oleh karena itu, aturan sewa dalam PSAK 73 ini mendorong pihak manajemen untuk lebih konservatif dalam menetapkan kebijakan pembayaran dividen kas, dengan kemungkinan mengurangi pembayaran dividen kas demi menjaga kesehatan keuangan dan kelangsungan operasional jangka panjang (Falavigna & Ippoliti, 2021). Perusahaan di bawah tekanan keuangan sering kali menahan laba daripada membayar dividen untuk mengamankan likuiditas dan mendukung operasional yang sedang berjalan (Malik & Kashiramka, 2025). Implikasinya, kapitalisasi sewa membengkakkan laporan posisi keuangan akibat munculnya aset hak guna dan liabilitas sewa, sementara laba bersih tertekan oleh beban bunga dan penyusutan yang sebelumnya tidak diakui dalam sewa operasi, dan kewajiban pelunasan pokok liabilitas sewa menyerap *free cash flow* perusahaan, sehingga kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham semakin terbatas. Dengan laba bersih dan *free cash flow* yang tertekan, ruang gerak manajer dalam mengalokasikan kas untuk pembayaran dividen menjadi semakin terbatas.

Penelitian Bohusova et al. (2022) juga membuktikan bahwa implementasi IFRS 16 memicu rata-rata kenaikan total aset sebesar 37%, kenaikan liabilitas hingga 55% dan penurunan ekuitas sebesar 4,5% akibat pola penyusutan aset yang lebih cepat dibandingkan liabilitasnya. Temuan yang sama oleh Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) menemukan bahwa kapitalisasi sewa operasi menyebabkan rata-rata penurunan ROA sebesar 34% (10%) dan rata-rata kenaikan rasio *debt to equity* sebesar 191% (47%) untuk perusahaan dengan penggunaan sewa tinggi (rendah). Pada konteks Indonesia, dampak tersebut sejalan dengan temuan Benitto (2025), Firaz dkk. (2022), Mashuri & Ermaya (2021), Nomorissa & Lindrawati (2021) yang menemukan adanya peningkatan aset dan liabilitas akibat implementasi PSAK 73. *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi rasio yang terdampak sangat signifikan akibat implementasi aturan PSAK 73 (Benitto, 2025; Firaz dkk., 2022; Jayanti, 2022; Rahmawati, 2021; Sabrina & Challen, 2023; Safitri dkk., 2019; Saing & Firmansyah, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa selain lonjakan *leverage*, ROA dan ROE perusahaan juga mengalami penurunan pasca implementasi standar sewa PSAK 73 (Firmansyah dkk., 2023; Permata & Andriani, 2021; Safitri dkk.,

2019; Saing & Firmansyah, 2021). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya perubahan yang cukup signifikan pada profil risiko dan performa keuangan perusahaan, yang memengaruhi pertimbangan manajer dalam mengambil keputusan.

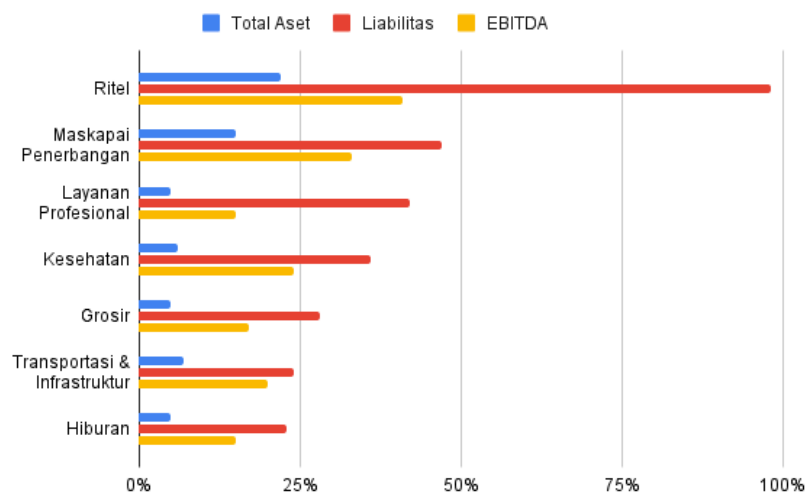
Dampak material yang disebabkan oleh implementasi PSAK 73 lebih terasa pada industri dengan intensitas sewa yang tinggi (Bohusova et al., 2022; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018; Sharma & Bansal, 2025; Stancheva-Todorova & Velinova-Sokolova, 2019). Beberapa penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa industri ritel secara global merupakan industri yang paling terdampak signifikan oleh perubahan standar pelaporan sewa ini (Bohusova et al., 2022; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018; Segal & Naik, 2019; Stancheva-Todorova & Velinova-Sokolova, 2019). Temuan-temuan tersebut juga diperkuat oleh data (IASB, 2016, hlm. 17) yang menyatakan bahwa subsektor ritel ada pada peringkat kedua industri yang paling bergantung kepada sewa. Meskipun terletak pada urutan kedua, data IASB tersebut menunjukkan bahwa ritel memiliki jumlah perusahaan terbanyak, sehingga mengindikasikan bahwa penerapan PSAK 73 pada industri ritel memberikan dampak yang lebih luas dan material. Dampak material tersebut diperkuat lagi oleh riset yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCoopers* (PwC) tahun 2016 mengenai dampak IFRS 16 yang dilakukan terhadap sampel 3.199 entitas pengguna IFRS di 51 negara. Riset global yang dilakukan oleh PwC ini menempatkan ritel sebagai industri dengan lonjakan aset, liabilitas dan *leverage* tertinggi. Berikut tabel yang menunjukkan hasil riset tersebut.

Tabel 1.1
Industri Terdampak oleh IFRS 16

Industri	Median peningkatan pada Total Aset	Median peningkatan pada akun Liabilitas	Median peningkatan pada EBITDA	Median peningkatan pada Rasio Leverage	Median penurunan pada Rasio Solvabilitas
Ritel	22%	98%	41%	1,3	13,3%
Maskapai Penerbangan	15%	47%	33%	0,37	5,7%

Industri	Median peningkatan pada Total Aset	Median peningkatan pada akun Liabilitas	Median peningkatan pada EBITDA	Median peningkatan pada Rasio Leverage	Median penurunan pada Rasio Solvabilitas
Layanan Profesional	5%	42%	15%	0,43	2,8%
Kesehatan	6%	36%	24%	0,81	3,1%
Grosir	5%	28%	17%	0,27	1,8%
Transportasi & Infrastruktur	7%	24%	20%	0,31	6,0%
Hiburan	5%	23%	15%	0,48	5,1%

Sumber: Diadaptasi dari PwC (2016)



Gambar 1.1

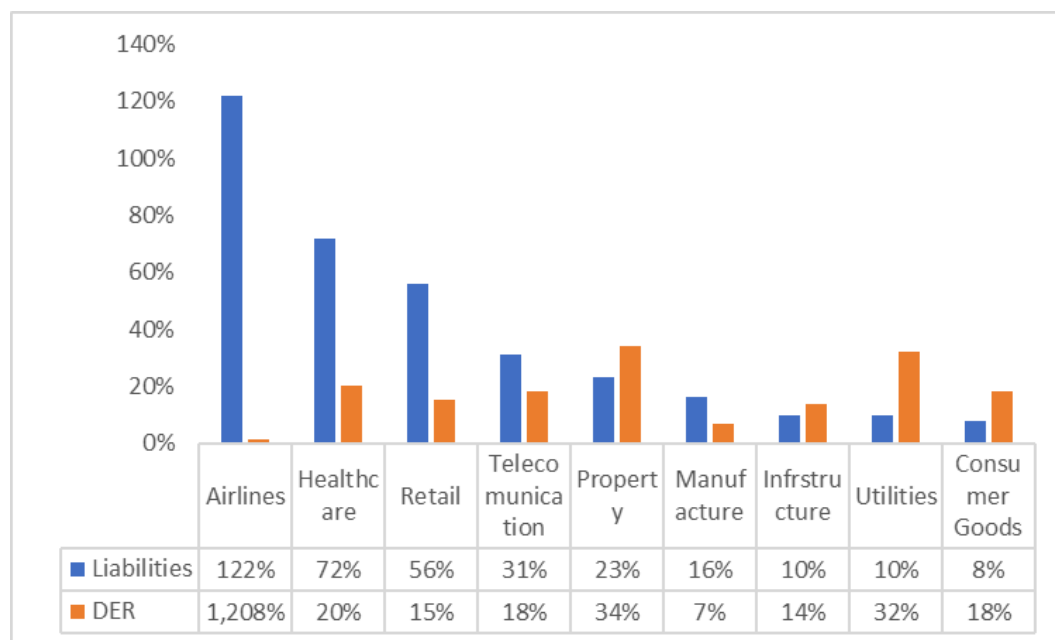
Grafik Peningkatan Aset, Liabilitas dan EBITDA Industri Ritel

Sumber: Diadaptasi dari PwC (2016)

Tabel 1.1 mempertegas bahwa industri ritel menanggung dampak material yang paling signifikan. Peningkatan median aset sebesar 22% dan lonjakan liabilitas sebesar 98% menunjukkan terjadinya kapitalisasi sewa yang besar, artinya industri ritel sangat bergantung pada sewa operasi. Peningkatan EBITDA sebesar 41% bukan disebabkan oleh peningkatan efisiensi operasional atau penjualan, melainkan hasil dari reklasifikasi beban sewa yang kini dipecah menjadi beban penyusutan dan beban bunga. Kenaikan rasio *leverage* sebesar 1,3 kali dan penurunan solvabilitas sebesar 13,3% menunjukkan adanya penurunan kualitas rasio keuangan secara teknis yang memicu pelanggaran *debt covenant* dengan pihak bank, karena perusahaan jauh lebih beresiko meskipun model bisnisnya

tidak berubah. Data PwC (2016) di atas merupakan estimasi proyeksi dampak IFRS 16 sebelum standar tersebut berlaku secara efektif. Meskipun demikian, data ini tetap relevan sebagai konteks global karena merepresentasikan ekspektasi para analis profesional terhadap besaran dampak yang akan dirasakan oleh setiap industri.

Relevansi di Indonesia terkonfirmasi melalui studi PwC Indonesia (2020) terhadap emiten dalam indeks KOMPAS 100, yang menunjukkan bahwa subsektor ritel merupakan salah satu sektor dengan dampak material tertinggi akibat implementasi PSAK 73.



Gambar 1.2

Sepuluh Perusahaan dengan Dampak Tertinggi oleh PSAK 73

Sumber: Diadaptasi dari PwC Indonesia (2020)

Riset tersebut menemukan bahwa pengakuan liabilitas sewa mengakibatkan lonjakan liabilitas pada perusahaan ritel hingga 56% dan kenaikan rasio DER sebesar 15%. Angka tersebut merepresentasikan pengakuan atas liabilitas sewa yang semula tersembunyi dan bersifat *off balance sheet*. Peningkatan liabilitas ini mencerminkan proses transisi ke arah realitas ekonomi bahwa komitmen sewa kini dikapitalisasi sebagai kewajiban pendanaan riil yang mempengaruhi struktur

modal perusahaan. Dampaknya, kenaikan DER sebesar 15% tersebut bukan sekedar perubahan angka melainkan indikasi meningkatnya risiko solvabilitas dan profil risiko keuangan perusahaan.

Di Indonesia, subsektor ritel menjadi kelompok usaha yang paling terdampak material oleh implementasi PSAK 73 karena ketergantungan tinggi terhadap kontrak sewa (Rizaldi & Munandar, 2025). PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) mengumumkan adanya penurunan laba bersih sebesar 9,21% atau sebesar Rp7,3 miliar, sehingga menjadi Rp72 miliar dari yang seharusnya berjumlah Rp 79,3 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya adopsi standar akuntansi sewa baru yakni PSAK 73 (www.kontan.co.id). Selain MAPA, perolehan laba bersih PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) di kuartal pertama 2020 hanya sebesar Rp27,3 miliar atau turun 83,63% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp166,8 miliar. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh *investor relations & corporate communications* MAPI yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 73 ini mengakibatkan berkurangnya laba bersih sejumlah Rp30 miliar, menjadi Rp27,3 miliar dari yang seharusnya Rp57,3 miliar (www.neraca.co.id).

Dampak implementasi PSAK 73 yang membawa perubahan pada peningkatan akun aset, liabilitas, beban penyusutan dan beban bunga tersebut berpotensi meningkatkan risiko finansial perusahaan. Dari perspektif *pecking order theory*, peningkatan risiko tersebut meningkatkan konservatisme manajer dalam menentukan sumber pendanaan dengan memprioritaskan pendanaan internal perusahaan. Sementara dalam perspektif *agency theory*, PSAK 73 menjadi alat pendisiplin dengan memaksa manajer untuk menggunakan kas perusahaan guna membayar kewajiban yang meningkat karena adanya penambahan akun liabilitas sewa. Dalam kerangka kedua teori tersebut, maka dengan implementasi PSAK 73 mendukung sikap manajer untuk lebih mengutamakan pendanaan internal perusahaan guna pemenuhan kewajiban finansial dan operasional perusahaan sebelum memutuskan untuk membagikan dividen. Seharusnya pembayaran dividen perusahaan akan menurun di awal masa implementasi PSAK 73. Namun,

sebuah fenomena ditemukan pada salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai subsektor ritel di BEI, yaitu PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) mengindikasikan adanya pertentangan dengan kerangka kedua teori tersebut. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan RANC tahun 2020, meskipun liabilitas dan beban keuangan meningkat, perusahaan justru menunjukkan optimisme dengan menaikkan DPR dari 21,9% di tahun 2019 menjadi 79% di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya kontradiksi antara peningkatan risiko akuntansi akibat standar baru dengan pencapaian kinerja serta kecukupan kapasitas kas riil perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha. Inkonsistensi ini menimbulkan adanya celah gap fenomena yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Fenomena yang ditunjukkan oleh PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) di atas justru memperkuat urgensi penelitian ini. Peningkatan DPR dari 21,9% menjadi 79% di tahun pertama implementasi PSAK 73 dapat mencerminkan manajemen meyakinkan pemegang saham bahwa kondisi keuangan perusahaan tetap sehat meskipun liabilitas secara akuntansi meningkat. Namun demikian, perilaku ini tidak serta-merta mewakili keseluruhan subsektor ritel. Perbedaan respon dividen antar perusahaan dalam menanggapi tekanan liabilitas sewa ini yang menjadi celah empiris yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan bahwa seluruh perusahaan ritel menurunkan dividen pasca PSAK 73, melainkan untuk menguji apakah terdapat tekanan negatif dari liabilitas sewa terhadap kebijakan pembayaran dividen kas pada subsektor ritel di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Hanifah dkk. (2024), Ihsannuddin dkk. (2022), dan Wahjudi (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, yakni peningkatan beban utang akan menekan rasio pembayaran dividen. Temuan tersebut dalam konteks implementasi PSAK 73, ketika liabilitas sewa dikapitalisasi ke dalam laporan posisi keuangan dan meningkatkan *leverage*, maka hal tersebut akan menjadi sinyal bagi manajer untuk menurunkan pembayaran dividen kas demi menjaga struktur permodalan.

Bagi perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, peningkatan kewajiban yang diakui dapat memicu kendala perjanjian (*debt covenant*), sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen (Lau, 2023; Qomariyah & Sukoco, 2021). Temuan Bohusova et al. (2022) membuktikan bahwa penerapan PSAK 73 melemahkan indikator-indikator keuangan utama dengan adanya lonjakan liabilitas sebesar 55% dan penurunan ROA hingga 24%, lonjakan ini tidak hanya mengubah tampilan laporan posisi keuangan, tetapi juga meningkatkan profil risiko perusahaan. Mengacu pada penelitian Bäuerle & Jaśkiewicz (2017), pemegang saham yang bersifat menghindari risiko (*risk averse*) tidak hanya mementingkan besaran dividen, tetapi juga stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pembengkakan utang akibat sewa ini menciptakan kekhawatiran akan risiko kebangkrutan, yang pada akhirnya memaksa manajer untuk menekan kebijakan dividen kas sebagai respon strategis untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional jangka panjang (Singh, 2024).

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai hubungan antara risiko dan kebijakan dividen. Temuan dari Liao et al. (2022) menunjukkan bahwa manajer yang menghindari risiko (*risk averse*) justru cenderung meningkatkan pembayaran dividen sebagai mekanisme perlindungan diri dan pemberian sinyal positif kepada pasar. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang juga mengadopsi IFRS 16 dan diadopsi oleh PSAK 73 justru memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan distribusi dividen perusahaan (Ertugrul & Demir, 2021; Guerreiro et al., 2021; Park & Park, 2022; Sharma & Bansal, 2025). Perbedaan temuan ini menciptakan adanya suatu gap empiris.

Kajian sebelumnya telah mengkaji kapitalisasi sewa menurut PSAK 73 berpotensi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (Ertugrul & Demir, 2021; Park & Park, 2022; Sharma & Bansal, 2025). Namun, peningkatan liabilitas sewa juga dapat memicu kendala perjanjian utang (*debt covenant*) (Lau, 2023), sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen (Qomariyah & Sukoco, 2021). Penelitian terdahulu umumnya mengkaji dampak kapitalisasi sewa di negara maju (Bohusova et al., 2022; Segal & Naik, 2019; Stancheva-Todorova

& Nadya Velinova-Sokolova, 2019), dan di Indonesia berfokus pada industri penerbangan, transportasi, jasa dan manufaktur (Maulana & Satria, 2021; Nomorissa & Lindrawati, 2021; Pamungkas dkk., 2024; Safitri dkk., 2019; Simon dkk., 2025), serta mengkaji PSAK 73 terbatas pada aspek kinerja, rasio, struktur modal dan profitabilitas (Aprilia dkk., 2023; Firaz dkk., 2022; Firmansyah dkk., 2023; Pamungkas dkk., 2024; Simon dkk., 2025) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Firaz dkk., 2022; Maulana & Satria, 2021; Simon dkk., 2025; Gamalasari & Wardhani, 2024).

Dengan demikian, urgensi penelitian ini untuk mengisi celah temuan dampak positif dan negatif dari PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen. Penelitian ini mengisi celah fokus negara maju dengan memberikan perspektif tambahan dari negara Indonesia. Penelitian ini melengkapi kajian terdahulu dengan memfokuskan objek penelitian pada subsektor ritel yang intensive menggunakan sewa. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menggunakan pengujian kuantitatif dengan proksi nilai liabilitas sewa. Berdasarkan *research gap* terkait dengan dampak implementasi PSAK 73 atas *leases* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan berfokus dalam menganalisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas pada perusahaan subsektor ritel di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi serta mengembangkan model penelitian dari Sharma dan Bansal (2025) yang mengkaji dampak implementasi IFRS 16 terhadap *dividend payout* di India. Penelitian ini fokus pada subsektor ritel di BEI karena dampak PSAK 73 paling material pada industri padat sewa ini. Kemudian, penelitian ini menempatkan *leverage* yang diproksikan dengan DER sebagai variabel moderasi yang menggunakan data kontinyu (bukan *dummy*) untuk menguji apakah *leverage* akan memperkuat atau justru memperlemah pengaruh PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen. Melalui penyesuaian tersebut, penelitian ini berfungsi memperluas kontribusi bagi perusahaan subsektor ritel di Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan pasca implementasi PSAK 73.

Penelitian ini akan memperluas bukti empiris mengenai dampak implementasi PSAK 73 terhadap keputusan manajerial dalam menentukan kebijakan pembayaran dividen kas. Hasil penelitian akan memberikan tambahan informasi bagi manajemen dan pemangku kepentingan mengenai konsekuensi implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas pada perusahaan yang memiliki ketergantungan terhadap sewa. Pemaparan di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Dampak Implementasi PSAK Nomor 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas dengan Leverage sebagai Variabel Pemoderasi pada Subsektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada upaya mengukur dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas pada subsektor ritel, yang dapat dirumuskan dalam poin berikut:

1. Apakah implementasi PSAK 73 berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen kas perusahaan?
2. Apakah implementasi PSAK 73 berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen kas dengan tingkat *leverage* sebagai variabel pemoderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efek implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas perusahaan.
2. Menganalisis apakah dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas perusahaan dipengaruhi oleh tingkat *leverage*.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas literatur mengenai penerapan *pecking order theory* dalam menjelaskan prioritas pendanaan dan *agency theory* dalam melihat konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dalam konteks perubahan regulasi akuntansi (PSAK 73) di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan mengenai dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas melalui tekanan liabilitas sewa, serta menguji peran *leverage* dalam memoderasi hubungan tersebut.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi manajer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi pihak manajer dalam meninjau kembali kebijakan urutan pendanaan perusahaan pasca implementasi PSAK 73. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara penggunaan laba ditahan untuk operasional dengan pemenuhan kebijakan dividen, sehingga manajer dapat mengambil kebijakan pendanaan yang lebih tepat tanpa mengganggu stabilitas keuangan internal.

2. Bagi pemegang saham

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi bagi pemegang saham dalam memantau perilaku manajer terkait kebijakan dividen pasca implementasi PSAK 73. Informasi ini dapat membantu pemegang saham dalam menilai penggunaan laba ditahan untuk penguatan pendanaan

internal guna memitigasi risiko adanya tindakan oportunistik yang merugikan hak investor.

3. Bagi pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak akuntansi sewa terhadap distribusi laba, sehingga dapat menjadi tambahan informasi empiris bagi regulator dalam meninjau efektivitas regulasi terkait transparansi pelaporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini disusun untuk menjelaskan hubungan konseptual antar variabel yang digunakan serta menjadi dasar dalam pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan ekonomi, sehingga menimbulkan hubungan keagenan. Sebagai *agent*, manajer memiliki tanggung jawab mengoptimalkan laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham (*principal*) sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan *agent* memperoleh kompensasi berbasis insentif seperti bonus yang dirancang untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak (Samsiah & Mashuri, 2023). Menurut Hariyanti & Pangestuti (2021), perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat memicu konflik keagenan. Manajer cenderung mengutamakan insentif ekonomi pribadi, berbanding terbalik dengan pemegang saham yang mengutamakan perolehan keuntungan maksimal (Uqba & Hindasah, 2025). Jensen (1986) menjelaskan bahwa dividen berfungsi sebagai mekanisme pengurang konflik keagenan karena memaksa manajer membagikan laba kepada pemegang saham, sehingga mengurangi *free cash flow* yang berisiko disalahgunakan. Lailiyah & Abadi (2021) serta Wiyanto & Artini (2024) juga menegaskan bahwa dividen merupakan mekanisme efektif untuk mengatasi masalah keagenan. Namun demikian, *agency theory* tidak secara otomatis memprediksi dividen selalu meningkat. Kemampuan

dan kesediaan manajer untuk membayar dividen sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan dan persepsi risiko yang dihadapi. Dalam konteks ini, implementasi PSAK 73 menjadi titik kritis yang mengubah perhitungan manajer dalam mengambil kebijakan.

Implementasi PSAK 73 mewajibkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, yang menyebabkan peningkatan pada akun aset dan liabilitas perusahaan secara signifikan (Firmansyah dkk., 2023). Perubahan standar akuntansi tersebut memiliki konsekuensi pada peningkatan liabilitas sewa yang dapat memicu *debt covenant* yang ditetapkan oleh kreditur berdasarkan rasio keuangan, sehingga membatasi fleksibilitas keuangan perusahaan. Kemudian, perubahan struktur laporan keuangan dengan munculnya beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga liabilitas sewa pada laporan laba rugi menyebabkan tekanan pada laba bersih yang dilaporkan (Firmansyah dkk., 2023), dan berpotensi mengubah persepsi kreditur dan investor terhadap kapasitas keuangan perusahaan.

Perubahan persepsi risiko tersebut mendorong manajer untuk bersikap lebih konservatif dalam pengambilan keputusan keuangan. Sharma & Bansal (2025) menegaskan bahwa *leverage* yang tinggi dan turunnya laba perusahaan pasca implementasi standar akuntansi sewa menunjukkan perilaku manajer yang lebih konservatif dalam pembayaran dividen karena meningkatnya persepsi risiko keuangan. Dalam kondisi ini, insentif untuk membayar dividen sebagai mekanisme pengurangan konflik keagenan menjadi berkurang dibandingkan tekanan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi kewajiban kontraktual perusahaan. Dengan demikian, dari perspektif *agency theory*, implementasi PSAK 73 diprediksi akan berdampak pada penurunan pembayaran dividen kas perusahaan.

2.1.2 Teori Urutan Pendanaan (*Pecking Order Theory*)

Teori urutan pendanaan (*pecking order theory*) dikembangkan oleh Myers (1984) didasarkan pada premis bahwa perusahaan menetapkan skala prioritas dalam memilih sumber pendanaan dengan menempatkan pendanaan internal sebagai pilihan utama sebelum mempertimbangkan alternatif eksternal. Dalam konteks penelitian ini, implementasi PSAK 73 yang memunculkan akun liabilitas sewa akan meningkatkan tingkat *leverage* perusahaan (Firmansyah dkk., 2023; Susanti dkk., 2021; Susiani, 2021). Berdasarkan teori tersebut, *leverage* mencerminkan sebagai sumber pendanaan eksternal yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pendanaan internal (Keown dkk., 2000, hlm. 558).

Oleh karena itu, strategi pendanaan perusahaan selalu membutuhkan pengambilan keputusan dan penilaian manajemen yang efektif (Keown dkk., 2000, hlm. 557). Manajer perlu mengambil kebijakan dalam memprioritaskan penggunaan kas internal untuk memenuhi kewajiban perusahaan, seperti pembayaran sewa guna menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dalam pandangan teori ini, dividen dipandang sebagai dana residual yang dibayarkan hanya apabila terdapat kelebihan dana setelah seluruh kewajiban dan kebutuhan investasi perusahaan telah terpenuhi melalui dana internal yang tersedia (Myers, 1984; Uqba & Hindasah, 2025). Dalam konteks implementasi PSAK 73, pengakuan liabilitas sewa yang meningkatkan liabilitas perusahaan menjadi terlihat lebih besar. Selaras dengan logika pada teori ini, kondisi tersebut mendorong manajer untuk memprioritaskan laba ditahan sebagai dana internal perusahaan guna memenuhi komitmen pembayaran sewa di masa depan.

Keputusan penggunaan pendanaan internal tersebut dibuat untuk menghindari pengambilan utang eksternal baru, sehingga ketersediaan dana internal yang dapat dialokasikan untuk pembayaran dividen menjadi berkurang. Dengan demikian, pengakuan liabilitas sewa yang meningkatkan *leverage* perusahaan, akan mendorong manajer untuk bersikap lebih konservatif dalam mengambil keputusan dengan mengurangi kesediaan dana internal untuk dibagikan sebagai dividen kas kepada pemegang saham.

Pecking order theory dan *agency theory* secara bersama-sama membangun prediksi yang konsisten dalam konteks implementasi PSAK 73. Dari perspektif *pecking order theory*, peningkatan liabilitas sewa mendorong manajer memprioritaskan pendanaan internal untuk pemenuhan kewajiban sebelum membagikan dividen. Dari perspektif *agency theory*, pengakuan liabilitas sewa yang lebih transparan mendisiplinkan manajer untuk menggunakan kas perusahaan secara lebih terukur guna memenuhi kewajiban kontraktual. Meskipun *agency theory* juga dapat memprediksi peningkatan dividen sebagai mekanisme pengurangan konflik keagenan. Jensen (1986) dalam konteks intensitas sewa yang tinggi pada subsektor ritel, menyatakan bahwa tekanan likuiditas akibat liabilitas sewa yang besar lebih dominan dibandingkan insentif untuk meningkatkan dividen.

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang Sewa

DSAK IAI mengesahkan PSAK 73 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Standar ini menggantikan PSAK 30 yang sebelumnya diadopsi dari IAS 17. PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi tunggal bagi penyewa (*lessee*) dengan mewajibkan pengakuan aset hak guna (*right of use assets*) dan liabilitas sewa untuk seluruh kontrak sewa dengan masa lebih dari 12 bulan, kecuali aset dasarnya yang bernilai rendah (IAI, 2017).

Pada tanggal permulaan, pihak penyewa wajib mencatat serta menilai aset hak guna berdasarkan biaya perolehan. Komponen biaya ini meliputi nilai kini dari pembayaran sewa yang dilakukan sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima (IAI, 2021; Permata & Andriani, 2021). Sementara, liabilitas sewa pada mulanya diukur sebagai nilai kini pembayaran sewa di masa depan sepanjang periode sewa. Dalam pengukuran liabilitas sewa, perusahaan harus mengakui beban bunga menggunakan tingkat diskonto, meliputi suku bunga implisit sewa, yaitu tingkat bunga internal yang menyamakan nilai kini pembayaran sewa dengan nilai wajar aset sewaan (IAI, 2021). Apabila suku bunga implisit tersebut tidak dapat ditentukan, maka digunakan suku bunga

pinjaman inkremental penyewa, yakni tingkat bunga yang akan dikenakan kepada penyewa jika mengambil pinjaman untuk memperoleh aset serupa (IAI, 2021). Pelaporan aset hak guna dan liabilitas sewa disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Sementara itu, beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa dicatat dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, implementasi PSAK 73 mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset hak guna, liabilitas sewa, beban penyusutan, dan beban bunga yang sebelumnya tidak dilaporkan pada PSAK 30 (Sugiarto & Dinarjito, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan juga mengalami perubahan. Konsep pengungkapan dalam PSAK 73 mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan mengenai transaksi sewa dalam catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

PSAK 73 diterbitkan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan dengan mewajibkan pengakuan seluruh sewa sebagai aset dan liabilitas (kecuali sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah), sehingga penyajian informasi akan lebih akurat mengenai komitmen keuangan, risiko dan posisi keuangan perusahaan (Ginting dkk., 2023). Dengan demikian, PSAK 73 lebih mencerminkan prinsip substansi yang lebih akurat dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Peralihan dari PSAK 30 ke PSAK 73 menyebabkan perubahan signifikan pada metode akuntansi di sisi penyewa (*lessee*), sedangkan pencatatan oleh pemberi sewa (*lessor*) tetap relatif tidak berubah (Mashuri & Ermaya, 2021). PSAK 30, yang memungkinkan penyewa memilih antara metode sewa operasi dan sewa pembiayaan, dianggap kurang mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh karena tidak semua aset dan liabilitas terkait sewa dicatat. Dengan adanya PSAK 73, penyewa diwajibkan mengakui hampir seluruh kontrak sewa sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pendekatan ini meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan mencerminkan komitmen dan risiko secara lebih transparan, serta menyelaraskan akuntansi sewa dengan standar internasional terbaru.

Tabel 2.1 menyajikan perbandingan utama antara PSAK 73 dan PSAK 30 yang sebelumnya digunakan dalam pengakuan sewa.

Tabel 2.1
Perbandingan PSAK 73 dan PSAK 30

Aspek	PSAK 73	PSAK 30
Pengakuan	Timbulnya pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, serta pengakuan beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.	Aset dan liabilitas hanya diakui jika sewa tersebut adalah sewa pembiayaan.
Pengukuran	Pengukuran aset hak guna pada biaya perolehan dan liabilitas sewa diukur pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.	Pengukuran sewa pada nilai nominal pembayaran sewa periode berjalan.
Penyajian	Aset hak guna dan liabilitas sewa disajikan di laporan posisi keuangan. Sementara, beban bunga dan penyusutan di laporan laba rugi.	Sewa operasi disajikan sebagai beban sewa di laporan laba rugi dan tidak ada penyajian di laporan posisi keuangan.
Pengungkapan	Pengungkapan informasi sewa dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya.	Pengungkapan pada total komitmen pembayaran di masa depan dan total beban sewa yang diakui pada periode berjalan.
Jurnal saat pengakuan awal	Aset hak guna xxx Liabilitas sewa xxx	-
Jurnal saat pembayaran	Liabilitas sewa xxx Beban bunga xxx Kas/Bank xxx	Beban sewa xxx Kas/Bank xxx
Jurnal saat penyusutan aset	Beban penyusutan xxx Akumulasi penyusutan xxx	-

Sumber: IAI (2021) dan Benitto (2025)

Menurut IASB (2016), adanya kritik bahwa model aturan sewa sebelumnya yaitu IAS 17 (PSAK 30) gagal memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Secara khusus pada informasi yang dilaporkan kurang transparan dan tidak memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, karena pendanaan dan aset yang disediakan oleh sewa seharusnya tercermin di dalam laporan posisi

keuangan. Maka, aturan lama dianggap tidak jujur. Selain itu, beberapa pengguna ingin mengestimasi nilai kini dari pembayaran sewa masa depan, karena datanya tidak ada, pengguna terpaksa menerka jumlah liabilitas perusahaan dengan rumus asal, sehingga hasilnya sering tidak akurat. Adanya dua model akuntansi yang berbeda untuk sewa (aset dan liabilitas sewa tidak diakui untuk sewa operasi tetapi diakui untuk sewa pembiayaan). Perbedaan tersebut mengurangi daya banding bagi pengguna laporan keuangan, dan memberikan peluang terjadinya rekayasa akuntansi.

Ketiadaan informasi mengenai sewa dalam laporan posisi keuangan berarti bahwa investor dan analis tidak memiliki gambaran lengkap mengenai posisi keuangan suatu perusahaan, dan tidak mampu membandingkan secara tepat antara perusahaan yang meminjam uang untuk membeli aset dengan perusahaan yang menyewa aset, tanpa melakukan penyesuaian sendiri (IASB, 2016). Oleh karena itu, dewan IASB memutuskan untuk menanggapi kritik tersebut dengan mengembangkan pendekatan baru pada akuntansi penyewa (*lessee*) yang mengharuskan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas atas hak yang diciptakan oleh sewa. IASB menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut akan menghasilkan representasi yang lebih tepat atas aset dan liabilitas penyewa, bersama dengan pengungkapan yang ditingkatkan, transparansi yang lebih besar juga terjadi pada *leverage* keuangan penyewa dan modal yang digunakan.

2.3 Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

2.3.1 Pengertian dan Konsep Dividen Kas

Dividen merupakan pembagian laba bersih yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham (Ifada & Nurcahyono, 2023; Ratnasari & Purnawati, 2019; Silviana & Mahirun, 2024). Dividen merupakan bentuk imbal balik atau *return* atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham di perusahaan (Rochmawati & Yuniningsih, 2022). Pembagian dividen biasanya dilakukan pada interval waktu tertentu dan menjadi salah satu cara perusahaan mengalokasikan laba kepada investor dengan mempertimbangkan kebutuhan modal untuk pengembangan bisnis. Secara umum, dividen dapat berbentuk kas, saham, properti, atau surat

janji pembayaran dividen di masa mendatang. Salah satu bentuk dividen yang paling umum diberikan adalah dividen kas, yaitu pembagian laba perusahaan secara langsung kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Shabrina & Hadian (2021) membagi jenis-jenis dividen yang meliputi dividen kas (*cash dividend*) yang dibayarkan langsung kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai, dividen saham (*share dividend*) berupa tambahan saham yang diberikan, dividen properti dalam bentuk aset selain uang, dan dividen skrip (*scrip dividend*) yang berupa surat janji pembayaran dividen pada waktu tertentu di masa depan. Dividen kas adalah yang paling umum dan biasanya menjadi pilihan utama pemegang saham, sedangkan dividen saham dan bentuk lainnya biasanya diberikan jika perusahaan mengalami keterbatasan kas namun tetap ingin membagikan keuntungan kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembayaran dividen kepada pemegang saham dan kebutuhan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat bagi manajer dalam mengelola alokasi laba sehingga dapat mendukung kelangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Menurut penelitian Jehuru & Amanah (2022), terdapat dua alternatif perlakuan yang dapat diambil oleh pihak manajemen terkait laba bersih perusahaan, yaitu mendistribusikannya kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen atau mengalokasikannya kembali sebagai laba ditahan (*retained earning*). Kebijakan pembayaran dividen ini berperan penting dalam mengelola alokasi laba antara distribusi ke pemegang saham dan pendanaan untuk pengembangan bisnis. Dengan kebijakan ini, manajemen dapat memastikan penggunaan dana yang optimal sesuai dengan prioritas perusahaan.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan yang diambil berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan, apakah laba tersebut akan ditahan sebagai laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa depan, ataukah laba tersebut akan

dibagikan kepada pemegang saham (Estuti dkk., 2020; Sejati dkk., 2020). Kebijakan dividen merupakan bagian dalam keputusan pendanaan perusahaan (Sejati dkk., 2020). Sebelum menentukan akan membagikan dividen, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan. Banyak yang beranggapan jika semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi tingkat dividen yang dibagikan kepada pemegang saham (Sejati dkk., 2020). Pada kenyataannya perusahaan juga dihadapkan dengan berbagai pertimbangan (Sejati dkk., 2020). Terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh perusahaan sebelum memutuskan untuk membagikan dividennya kepada pemegang saham, yang meliputi ukuran perusahaan, *free cash flow*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan *leverage* (Estuti dkk., 2020; Kristin dkk., 2021; Santikah & Syahzuni, 2023; Sejati dkk., 2020).

Pentingnya ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen untuk memaksimalkan peluang bisnis sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar, maka perusahaan besar berpeluang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam distribusi dividen (Santikah & Syahzuni, 2023).

Profesor Jensen dalam buku Keown dkk. (2000, hlm. 558) mendefinisikan *free cash flow* atau arus kas bebas sebagai arus kas lebih yang dibutuhkan untuk mendanai semua proyek yang memiliki nilai sekarang neto saat didiskonto pada biaya modal yang relevan. Jensen juga mengemukakan bahwa arus kas bebas yang besar akan mengarahkan pada perilaku manajer yang salah dan keputusan yang buruk, yang bukan demi kepentingan pemegang saham perusahaan (Keown dkk. 2000, hlm. 558). Artinya, manajer memiliki insentif untuk memegang arus kas bebas, bukan mengolahnya menjadi pembayaran dividen tunai yang lebih tinggi (Keown dkk., 2000, hlm. 558). Jumlah arus kas bebas yang dihasilkan dari operasional perusahaan, karena berdasarkan dari perspektif teori agensi, perusahaan dengan arus kas bebas tinggi harus membayar dividen lebih tinggi guna meminimalisir potensi terjadinya konflik (Heryana et al., 2023; Shafai dkk., 2019).

Profitabilitas sangat menentukan besarnya kebijakan dividen kepada investor, karena dividen sendiri diperoleh dari profit dan dibagikan perusahaan terhadap pemegang saham (Sudrajat dkk., 2021). Selain itu, profitabilitas juga didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal (Estuti dkk., 2020). Laba tersebut dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap pembagian dividen ke pemilik saham (Kristin dkk., 2021).

Pertumbuhan perusahaan merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki dampak yang menguntungkan (Sejati dkk., 2020). Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, semakin besar dana yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tersebut, namun konsekuensinya, dividen yang dibayarkan akan lebih rendah (Utami & Gumanti, 2019).

Leverage juga turut menentukan kebijakan dividen. Perusahaan dengan persentase utang yang tinggi cenderung memprioritaskan pelunasan kewajiban dibandingkan pembagian dividen kepada pemegang saham (Rohov et al., 2020; Santikah & Syahzuni, 2023). Hal ini dilakukan untuk menghindari peningkatan risiko keuangan yang dapat mengancam kelangsungan operasi perusahaan (Fathony dkk., 2025).

Salah satu rasio *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total ekuitas. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya menggunakan modal sendiri. Rendahnya angka rasio ini mencerminkan tingkat solvabilitas yang lebih baik, karena perusahaan dinilai mampu menjamin kewajibannya secara optimal. Peningkatan kewajiban akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin menurunkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

Penelitian ini menggunakan *leverage* sebagai pemoderasi dikarenakan tingginya tingkat *leverage* seringkali menjadi batasan bagi perusahaan untuk mendistribusikan labanya sebagai dividen, karena arus kas yang ada harus diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada akun sewa baru. Dengan demikian, *leverage* diduga dapat memoderasi efek implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan dividen.

2.4 Tingkat *Leverage* Sebagai Variabel Pemoderasi

Tingkat *leverage* mencerminkan sejauh mana operasional dan aset perusahaan didanai melalui utang dibandingkan ekuitas (Mauris & Rizal, 2021). Menurut *agency theory*, utang berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi tindakan manajerial, namun di sisi lain, utang yang tinggi menciptakan beban bunga dan kewajiban pelunasan yang besar. Hal ini memaksa manajemen untuk memprioritaskan arus kas guna memenuhi kewajiban kepada kreditur dibandingkan membagikannya sebagai dividen kepada pemegang saham (Hariyanti & Pangestuti, 2021; Hidayat, 2019).

Dalam penelitian ini, *leverage* diposisikan sebagai variabel pemoderasi karena tinggi rendahnya rasio utang diyakini akan memperkuat atau memperlemah dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan dividen. Implementasi PSAK 73 yang mewajibkan kapitalisasi sewa secara otomatis meningkatkan jumlah liabilitas di laporan posisi keuangan. Bagi perusahaan yang sudah memiliki tingkat *leverage* tinggi sejak awal, tambahan liabilitas dari kapitalisasi sewa ini akan mendorong rasio keuangan perusahaan mendekati ambang batas kontrak utang (*debt covenant*). Kondisi ini menciptakan tekanan bagi manajemen untuk bertindak lebih konservatif dengan menahan laba guna menjaga fleksibilitas keuangan dan menghindari risiko gagal bayar. Sebaliknya, pada perusahaan dengan *leverage* rendah, peningkatan liabilitas akibat implementasi PSAK 73 mungkin tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividennya. Dengan demikian, *leverage* dapat berperan sebagai faktor yang memperparah (memperkuat) pengaruh negatif implementasi PSAK 73 terhadap penurunan dividen kas. Hal ini konsisten dengan temuan Sharma &

Bansal (2025) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi mengalami penurunan dividen yang jauh lebih signifikan pasca implementasi IFRS 16 dibandingkan perusahaan dengan *leverage* rendah.

Selain tingkat *leverage*, penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel kontrol yang diprediksi mempengaruhi kebijakan dividen.

Penempatan ukuran perusahaan sejalan dengan penelitian Sharma dan Bansal (2025) yang menemukan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki pembayaran dividen yang lebih tinggi karena arus kas yang stabil. Tanpa mengontrol variabel ini, pengaruh PSAK 73 terhadap dividen akan terkontaminasi oleh perbedaan skala aset perusahaan. Selanjutnya, profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol karena merupakan determinan utama kebijakan dividen. Semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan, semakin besar kapasitas finansial perusahaan untuk mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Selain itu, penelitian ini juga mengontrol variabel arus kas operasi (CFO) dan pertumbuhan pendapatan (*growth*). Arus kas operasi mencerminkan ketersediaan likuiditas riil untuk pembayaran kas dividen, sementara pertumbuhan pendapatan mengendalikan pengaruh kebutuhan laba untuk ekspansi perusahaan di masa depan.

2.5 Dampak Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 Tentang Sewa Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

Taleb (2019) menemukan bahwa kebijakan pembayaran dividen kas digunakan oleh manajer sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan kepada pemegang saham. Dalam perspektif teori keagenan, dividen berperan sebagai mekanisme efektif untuk mengatasi masalah keagenan dengan mengurangi potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham. Dorongan dari pemegang saham terhadap pembayaran dividen muncul terutama ketika perusahaan memiliki arus kas bebas yang cukup untuk memonitor aktivitas manajer (Tijjani & Bello, 2019).

Sejalan dengan itu, Sharma dan Bansal (2025) menemukan bahwa implementasi PSAK 73 (diadopsi dari IFRS 16) mengenai akuntansi sewa, secara signifikan meningkatkan transparansi keuangan melalui kewajiban kapitalisasi sewa guna usaha. Peningkatan transparansi ini mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga berdampak pada kebijakan pembayaran dividen kas perusahaan. Dengan demikian, PSAK 73 tidak hanya mempengaruhi penyajian laporan keuangan, tetapi juga secara langsung mengarahkan strategi pembayaran dividen kas, khususnya dalam konteks pengelolaan arus kas dan pengawasan keuangan perusahaan.

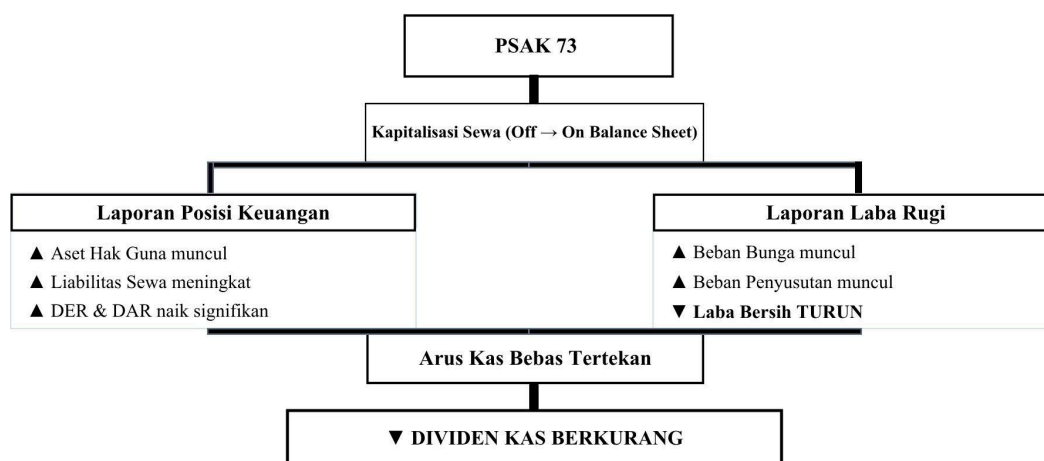
Namun, implementasi PSAK 73 juga menyebabkan kapitalisasi sewa, yaitu perusahaan harus mengakui kontrak sewa sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Pengakuan aset hak guna (*right of use asset*) dalam laporan posisi keuangan dapat meningkatkan total aset, sementara pengakuan liabilitas sewa dapat meningkatkan total liabilitas. Akibat penambahan aset dan liabilitas tersebut, rasio keuangan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi utang terhadap aset dan ekuitas perusahaan meningkat.

Sedangkan pada laporan laba rugi, muncul dua beban baru sebagai konsekuensi perlakuan PSAK 73, yaitu beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan atas aset hak guna. Beban bunga ini mencerminkan kewajiban pembayaran utang yang meningkat sehingga menekan arus kas bebas perusahaan. Tekanan pada arus kas bebas ini menyebabkan pengurangan dana yang tersedia untuk aktivitas perusahaan lainnya, termasuk untuk membayar dividen. Di sisi lain, beban penyusutan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar pembagian dividen.

Dengan menurunnya arus kas bebas dan laba bersih, manajemen perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan berbagai kebijakan keuangan, termasuk kebijakan pembayaran dividen kas. Untuk menjaga kesehatan keuangan

dan menghindari risiko kegagalan pembayaran utang, manajemen cenderung mengurangi atau membatasi pembayaran dividen kas.

Berikut disajikan alur dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas.



Gambar 2.1

Alur Implementasi PSAK 73 Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan PSAK 73 Sewa (IAI, 2017)

Gambar di atas menunjukkan bahwa implementasi PSAK 73 mengubah struktur laporan keuangan dengan memunculkan aset dan liabilitas baru. Kenaikan liabilitas sewa meningkatkan risiko *leverage*, sementara beban bunga dan penyusutan menekan laba bersih. Perubahan ini mempersempit ruang gerak perusahaan dalam mendistribusikan dividen kas kepada pemegang saham.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas pada perusahaan subsektor ritel di Indonesia disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

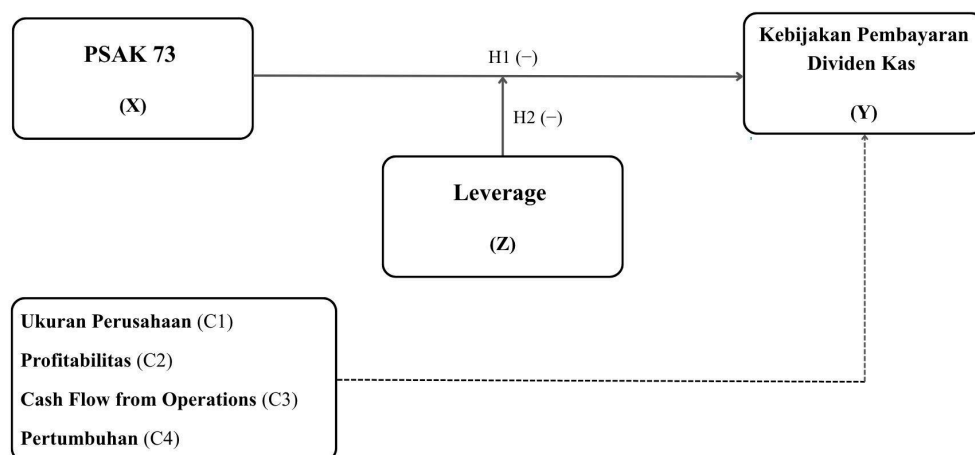
No	Nama Penulis (Tahun)	Negara	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sharma & Bansal (2025)	India	Variabel Independen: IFRS 16 Variabel Dependen: <i>Dividend Payout</i> Variabel Moderasi: - <i>Leverage</i> - <i>Family Ownership</i>	Adopsi IFRS 16 memiliki dampak positif terhadap kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan <i>lease intensive</i> di India, namun berdampak negatif pada perusahaan dengan tingkat <i>leverage</i> yang tinggi.
2	Firmansyah dkk. (2023)	Indonesia	Variabel Independen: Penerapan PSAK 73 Variabel Dependen: - Struktur Modal - Profitabilitas	Penerapan PSAK 73 menyebabkan peningkatan signifikan pada rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan penurunan signifikan pada profitabilitas perusahaan.
3	Lau (2023)	Malaysia	Variabel Independen: IFRS 16 Variabel Dependen: <i>Gearing</i>	Perusahaan mengurangi sewa operasi sebagai respon terhadap risiko peningkatan rasio utang yang ditimbulkan oleh IFRS 16. Strategi ini pada perusahaan dengan <i>gearing</i> tinggi, bertujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dengan kreditur.
4	Liao et al. (2022)	China	Variabel Independen: - <i>Behavioral Foundations</i> - <i>Corporate Strategic Behavior</i> Variabel Dependen: <i>Corporate Dividend Policy</i>	Perusahaan dengan risiko tinggi jarang membayar dividen, namun perusahaan dengan perilaku enggan merugi (<i>loss averse</i>) cenderung membayar dividen.
5	Firaz dkk. (2022)	Indonesia	Variabel Independen: Penerapan PSAK 73 Variabel Dependen: - Rasio keuangan (DER dan DAR) - <i>Book tax difference</i> - Penghindaran pajak	PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio DER dan DAR. Peningkatan ini dapat meningkatkan biaya modal perusahaan, sehingga perusahaan perlu memitigasi risiko terkait penerapan PSAK 73.
6	Nomorissa &	Indonesia	Variabel Independen: Penerapan PSAK 73 Variabel Dependen:	Perhitungan rasio DAR dan rasio DER menunjukkan bahwa apabila perusahaan jasa

No	Nama Penulis (Tahun)	Negara	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Lindrawati (2021)		Kinerja Keuangan	menerapkan PSAK 73, maka kinerja keuangan perusahaan jasa dapat terlihat buruk.
7	Qomariyah & Sukoco (2021)	Indonesia	Variabel Independen: - Likuiditas - Profitabilitas - <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Kebijakan dividen	Likuiditas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kebijakan dividen. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kebijakan dividen.
8	Tran (2020)	AS	Variabel Independen: <i>Degree of total leverage</i> Variabel Dependen: - Probabilitas - Rasio pembayaran dividen	Bank dengan tingkat <i>leverage</i> total yang tinggi cenderung lebih jarang membayar dividen dibandingkan dengan bank lainnya, dan bank-bank tersebut menghabiskan sebagian kecil dari pendapatannya untuk dibagikan kembali kepada pemegang saham.
9	Salman dkk. (2020)	Indonesia	Variabel Independen: Revaluasi aset tetap dan kebijakan dividen Variabel Dependen: Nilai perusahaan Variabel Moderasi: <i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> berhasil memperkuat dampak negatif revaluasi aset tetap terhadap nilai perusahaan. <i>Leverage</i> juga memperkuat pengaruh kebijakan dividen yang sebelumnya tidak signifikan, menjadi dampak positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan.
10	Wahjudi (2020)	Indonesia	Variabel Independen: - <i>Collateralizable assets</i> - <i>Growth in net assets</i> - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Profitabilitas Variabel Dependen: Kebijakan dividen	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, artinya semakin tinggi <i>leverage</i> perusahaan maka semakin rendah kebijakan dividen perusahaan manufaktur di Indonesia.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang dirangkum pada Tabel 2.2 di atas, terdapat perbedaan arah temuan. Sharma & Bansal (2025) menemukan bahwa adopsi IFRS 16 di India meningkatkan pembayaran dividen perusahaan yang dikaitkan dengan berkurangnya asimetri informasi akibat transparansi laporan keuangan yang lebih baik. Namun dalam penelitian yang sama, Sharma & Bansal (2025) juga menemukan bahwa dampak positif tersebut berbalik arah menjadi negatif pada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, karena tekanan perjanjian utang (*debt covenant*) membatasi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan dividen.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PSAK Nomor 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas, dengan tingkat *leverage* sebagai variabel pemoderasi, ukuran perusahaan, profitabilitas, arus kas operasi dan pertumbuhan pendapatan sebagai variabel kontrol, pada subsektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian ini, berikut disajikan kerangka konseptual yang memudahkan pemahaman atas alur dan interaksi variabel-variabel yang dikaji.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

Implementasi PSAK 73 membawa perubahan yang signifikan dalam proses pencatatan sewa pada laporan keuangan perusahaan (Susanti dkk., 2021). Selain itu, Segal & Naik (2019), Gamalasari & Wardhani (2024) menyatakan bahwa pengesahan dan implementasi PSAK 73 (diadopsi dari IFRS 16) tentang *leases* akan mempengaruhi penyajian pada pelaporan keuangan, terutama pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Aturan ini mengharuskan perubahan pencatatan sewa dari *off balance sheet* menjadi *on balance sheet* yang mengubah proses pengukuran dan penyajian sewa di laporan keuangan (IAI, 2017). Perubahan pencatatan sewa tersebut menyebabkan peningkatan pada beberapa akun di dalam laporan posisi keuangan, akun tersebut meliputi akun liabilitas sewa dan akun aset hak guna (Bohusova et al., 2022; Benitto, 2025; IAI, 2017; Nomorissa & Lindrawati, 2021), yang turut meningkatkan *leverage* perusahaan. Selain pada laporan posisi keuangan, perubahan pencatatan sewa ini juga menimbulkan perubahan pada sisi laporan laba rugi dengan munculnya akun beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan atas aset hak guna (IAI, 2017; Nomorissa & Lindrawati, 2021).

Beban penyusutan dan beban bunga yang dibebankan di awal masa sewa dapat menekan laba bersih perusahaan (Nomorissa & Lindrawati, 2021; PwC Indonesia, 2019; Samsiah & Mashuri, 2023, Firmansyah dkk., 2023). Karena dividen diambil dari laba (*retained earnings*), laba yang turun berpotensi menurunkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Liabilitas yang tinggi dan turunnya laba, serta berkurangnya *free cash flow* perusahaan pasca aturan sewa baru ini berpotensi menyebabkan terjadinya kendala keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan (Firaz dkk., 2022). Manajer mengadopsi sikap konservatif untuk meminimalisir risiko keuangan dan beban utang. Penurunan laba membatasi basis dividen dan meningkatkan kendala keuangan, sehingga mengurangi kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kas kepada

pemegang saham (Hariyanti & Pangestuti, 2021; Tran, 2020, Rochmawati & Yuniningsih, 2022).

Berdasarkan *pecking order theory*, sewa kini diakui sebagai bentuk pendanaan eksternal yang membebani kas internal perusahaan (Sharma & Bansal, 2025; Susanti dkk., 2021). Munculnya liabilitas sewa baru ini yang berpotensi meningkatkan risiko keuangan menggeser prioritas penggunaan dana internal dari distribusi dividen demi pengelolaan risiko keuangan perusahaan (Akbar dkk., 2025). Oleh karena itu, dividen yang bersifat residual hanya akan dibayarkan jika kebutuhan pendanaan internal untuk kewajiban sewa tersebut telah terpenuhi.

Apabila ditinjau dari perspektif *agency theory*, konflik kepentingan muncul ketika manajer harus memilih antara memenuhi kewajiban kontrak atau memuaskan pemegang saham melalui dividen (Ginting dkk., 2023). Penerapan PSAK 73 yang meningkatkan pengakuan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan, yang secara kontraktual meningkatkan beban tetap perusahaan berupa bunga sewa. Peningkatan liabilitas sewa ini menciptakan tekanan bagi manajer untuk bersikap lebih konservatif guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Mengingat manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko keuangan (Samsiah & Mashuri, 2023), adanya beban liabilitas sewa yang lebih besar pasca implementasi PSAK 73 akan memaksa manajer untuk mengurangi alokasi laba yang dibagikan sebagai dividen. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi agar arus kas perusahaan tetap terjaga untuk melunasi liabilitas sewa yang kini tercatat secara formal, sehingga kepentingan kreditor dan stabilitas internal lebih diprioritaskan dibandingkan pembayaran dividen.

Kewajiban finansial yang timbul akibat kapitalisasi sewa dalam PSAK 73 memiliki karakteristik yang serupa dengan beban utang dalam mempengaruhi kebijakan dividen. Sejalan dengan penelitian Vinh (2020), perusahaan yang memikul beban kewajiban yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembayaran dividen tunai guna menjaga sumber daya keuangan demi memenuhi kewajiban

kontraktualnya. Dalam konteks PSAK 73, peningkatan liabilitas sewa mengharuskan perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang lebih konservatif untuk menjaga cadangan kas perusahaan (Tran, 2020). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk manajemen risiko, yaitu perusahaan dengan profil risiko yang meningkat akibat pencatatan sewa *on balance sheet* akan lebih memprioritaskan stabilitas keuangan daripada mendistribusikan laba kepada pemegang saham (Bäuerle & Jaśkiewicz, 2017; Liao et al., 2022). Dengan demikian, adanya tambahan liabilitas sewa ini mendorong manajemen untuk mengambil strategi pembayaran dividen yang lebih rendah guna meminimalkan risiko kesulitan keuangan di masa depan.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris sebelumnya, penelitian ini memprediksi bahwa dalam konteks subsektor ritel di Indonesia dengan intensitas sewa tinggi, efek tekanan keuangan yang ditimbulkan oleh kapitalisasi sewa PSAK 73 akan lebih dominan dibandingkan efek transparansi informasi. Dengan demikian, meskipun PSAK 73 dapat meningkatkan transparansi yang dapat mendorong pembayaran dividen lebih tinggi, namun beban keuangan tambahan berupa beban bunga dan beban penyusutan yang signifikan pada perusahaan ritel dengan intensitas sewa tinggi akan mendorong manajemen untuk mengurangi atau membatasi pembayaran dividen kas demi menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap batasan utang. Berdasarkan tinjauan teoritis dan analisis kontekstual tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Implementasi PSAK 73 berpengaruh negatif terhadap kebijakan pembayaran dividen kas perusahaan.

2.8.2 Tingkat *Leverage* Perusahaan sebagai Pemoderasi Dampak

Implementasi PSAK 73 terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

Implementasi PSAK 73 berpotensi meningkatkan *leverage* (DER), yang digunakan untuk menandakan stabilitas perusahaan (Samsiah & Mashuri, 2023). Pengakuan aset dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan kemungkinan besar akan dikaitkan dengan peningkatan rasio utang (*debt ratios*).

Tekanan tersebut membuat perusahaan mengalami keterbatasan dana untuk kepentingan operasional perusahaan. Perubahan baru ini dapat berakibat buruk jika tidak segera diantisipasi, sehingga manajer perlu memberikan sinyal yang lebih konservatif (Sharma & Bansal, 2025). Penelitian Maiyo et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat konservatisme yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap kebijakan dividen, terutama ketika perusahaan menghadapi kendala keuangan. Penurunan tersebut meningkatkan tekanan finansial pada perusahaan, yang pada akhirnya memperkecil ruang pembayaran dividen kas bagi pemegang saham.

Kondisi ini dapat diperparah oleh meningkatnya *leverage* perusahaan. Tinggi rendahnya *leverage* akan menentukan seberapa besar penurunan laba dapat mempengaruhi kebijakan dividen kas perusahaan. Semakin besar *leverage* maka semakin kecil laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dan semakin tinggi risiko perusahaan (Wahjudi, 2020; Afandi & Soekotjo, 2020; Salman dkk., 2020). Penelitian ini memposisikan *leverage* sebagai beban utang perusahaan yang sudah ada sebelum implementasi PSAK 73 yang bisa berdampak pada sensitivitas perusahaan terhadap adanya tambahan liabilitas sewa yang diakui setelah implementasi PSAK 73. Perusahaan dengan *leverage* tinggi, akan lebih sensitif terhadap perubahan akibat PSAK 73 (Sharma & Bansal, 2025).

Jika dilihat dari perspektif *pecking order theory* yang menunjukkan bahwa perusahaan memprioritaskan pendanaan internal (Sharma & Bansal, 2025). Namun, peran persyaratan utang (*debt covenants*) menjadi sangat krusial dalam membentuk keputusan pendanaan dan dividen (Sharma & Bansal, 2025). Bagi perusahaan dengan *leverage* tinggi, peningkatan liabilitas yang diakui berdasarkan IFRS 16 dapat memicu pembatasan persyaratan utang (Lau, 2023), sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan dividen. Dinamika ini menyoroti adanya pertukaran antara peningkatan akses ke modal eksternal karena berkurangnya asimetri informasi dengan pembatasan keuangan yang diberlakukan oleh laporan liabilitas yang lebih tinggi (Sharma & Bansal, 2025). Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung lebih memilih untuk

menyimpan kas dan mengurangi pembayaran dividen demi menghindari pelanggaran terhadap persyaratan utang tersebut (Sharma & Bansal, 2025). Perubahan dalam praktik akuntansi ini memperkenalkan konservatisme keuangan, yakni perusahaan dengan utang signifikan mungkin memprioritaskan pembayaran utang di atas distribusi dividen (Sharma & Bansal, 2025). Dengan demikian, dampak dari kebijakan dividen dapat berubah bagi perusahaan dengan tingkat *leverage* yang berbeda (Sharma & Bansal, 2025). Manajer pada perusahaan dengan *leverage* tinggi akan menjadi lebih konservatif dan mungkin mengubah pembayaran dividennya (Sharma & Bansal, 2025).

Agency theory melihat kondisi kendala keuangan tersebut memicu timbulnya perilaku penghindaran risiko (*risk aversion*) dari pihak manajer. Kondisi pendanaan eksternal yang terbatas dan biaya modal yang meningkat, menjadikan manajer cenderung mengadopsi prinsip konservatisme dalam pengambilan keputusan keuangan guna menjaga stabilitas perusahaan. Prioritas utama manajer bergeser pada upaya mitigasi risiko gagal bayar (*default risk*) terhadap kreditur. Guna memitigasi hal tersebut, manajer perusahaan cenderung menetapkan kebijakan dividen yang rendah dengan mengalokasikan porsi laba yang lebih besar sebagai laba ditahan. Langkah ini berfungsi untuk memperkuat posisi kas internal, sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan dalam memenuhi kewajiban operasional maupun finansial.

Berdasarkan perspektif di atas, *leverage* berperan sebagai variabel pemoderasi yang menentukan kekuatan dampak PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen, semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin kuat dampak negatif PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas. Penelitian oleh Sharma & Bansal (2025) menemukan bahwa dampak IFRS 16 terhadap dividen berbeda antara perusahaan dengan *leverage* tinggi dan rendah. Pada perusahaan *leverage* tinggi, dampak negatif terhadap dividen lebih kuat karena tekanan *debt covenant*. Penelitian Lau (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan utang signifikan mengalami kendala *covenant* yang membatasi kemampuan membagikan dividen. Temuan dari Qomariyah & Sukoco (2021) juga menemukan bahwa *leverage*

berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian dari Salman dkk. (2020) menemukan *leverage* berhasil memoderasi hubungan antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan di Indonesia, mengkonfirmasi peran *leverage* sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris sebelumnya, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Tingkat *leverage* memperkuat pengaruh negatif implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif guna menganalisis dampak implementasi PSAK 73 sebagai variabel independen terhadap kebijakan pembayaran dividen kas sebagai variabel dependen dengan menempatkan *leverage* sebagai pemoderasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui portal resmi www.idx.co.id. Pemilihan periode pengamatan antara tahun 2020 hingga 2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini merupakan fase krusial karena perusahaan mulai menyesuaikan pelaporan keuangannya secara penuh terhadap standar PSAK 73 yang efektif sejak 1 Januari 2020. Fokus penelitian pada sektor ritel yang dipilih karena industri tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap aset sewa, sehingga dampak dari penerapan PSAK 73 diprediksi akan terlihat lebih signifikan terhadap struktur laporan keuangan dan keputusan manajer terkait dividen dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, informasi pendukung juga dihimpun melalui penelusuran literatur daring guna memperkaya konteks dan analisis penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan subsektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2024. Perusahaan subsektor ritel dipilih karena menjadi peringkat ke-1 industri yang liabilitasnya paling meningkat akibat implementasi IFRS 16 (berdasarkan riset global PwC, 2016). Selain itu, perusahaan subsektor ritel dipilih karena

menjadi salah satu subsektor yang terkena efek material terutama pada liabilitas perusahaan akibat dari implementasi PSAK 73 (PwC Indonesia, 2020).

3.2.2 Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan yaitu perusahaan yang termasuk dalam subsektor ritel sesuai klasifikasi resmi BEI selama periode 2020-2024. Pemilihan sektor ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian konteks operasi dan karakteristik industri, dikarenakan subsektor ritel memiliki intensitas transaksi sewa yang tinggi serta pemilihan rentang waktu pengamatan antara tahun 2020 hingga 2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini merupakan fase krusial karena perusahaan mulai menyesuaikan pelaporan keuangannya secara penuh terhadap standar PSAK 73. Perusahaan subsektor telah listing di BEI sebelum tahun 2020. Kriteria ini ditetapkan untuk menjamin ketersediaan data keuangan yang lengkap dan konsisten selama periode pengamatan. Dengan demikian, analisis dampak implementasi PSAK 73 dapat diamati secara akurat tanpa adanya bias dari data yang tidak lengkap.

Perusahaan tidak mengalami sanksi suspensi selama periode 2020-2024. Kriteria tersebut ditetapkan untuk menghindari distorsi data akibat gangguan operasional atau tata kelola yang tidak wajar, sehingga sampel yang dianalisis merupakan perusahaan yang memenuhi kewajiban regulasi pasar modal secara konsisten. Selanjutnya perusahaan pernah mengungkapkan data liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan selama periode pengamatan 2020-2024. Perusahaan yang tidak pernah mengungkapkan liabilitas sewanya tidak memiliki data liabilitas sewa yang dapat dianalisis. Terakhir, perusahaan pernah membagikan dividen kas selama periode pengamatan 2020-2024. Perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen kasnya tidak memiliki data kebijakan dividen yang dapat dianalisis.

Adapun kriteria tersebut dapat dirangkum menjadi lima kriteria berikut:

1. Perusahaan subsektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2020-2024. Pemilihan rentang waktu pengamatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini merupakan fase krusial saat perusahaan mulai menyesuaikan pelaporan keuangannya secara penuh terhadap standar PSAK 73 yang efektif sejak 1 Januari 2020.
2. Perusahaan subsektor telah listing di BEI sebelum tahun 2020, sehingga penelitian memiliki data keuangan lengkap selama periode pengamatan 2020-2024.
3. Perusahaan tidak mengalami sanksi suspensi selama periode pengamatan 2020-2024 untuk menjaga konsistensi ketersediaan data laporan keuangan yang telah diaudit secara penuh serta dipublikasikan secara tepat waktu guna menghindari bias hasil penelitian.
4. Perusahaan pernah mengungkapkan data liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan selama periode pengamatan 2020-2024.
5. Perusahaan pernah membagikan dividen kas selama periode pengamatan 2020-2024.

Pemilihan kriteria di atas dimaksudkan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan relevan dengan fokus penelitian terkait dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas.

3.3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi

Studi ini menitikberatkan pada dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas, dengan mempertimbangkan peran *leverage* sebagai variabel pemoderasi dan ukuran perusahaan, profitabilitas, arus kas operasi, serta pertumbuhan pendapatan perusahaan sebagai variabel kontrol.

3.3.1 Variabel Independen

3.3.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi PSAK 73 tentang *leases* yang diproksikan dengan nilai liabilitas sewa.

Implementasi PSAK 73 memunculkan empat komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu aset hak guna (*right of use asset*), liabilitas sewa (*lease liability*), beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa (IAI, 2020). Meskipun keempat komponen tersebut merupakan dampak dari penerapan PSAK 73, penelitian ini memilih liabilitas sewa sebagai proksi utama. Sesuai dengan PSAK 73, liabilitas sewa diakui sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan (IAI, 2020). Berbeda dengan aset hak guna yang nilainya terus menurun akibat penyusutan sistematis (IAI, 2020), liabilitas sewa mencerminkan kewajiban finansial perusahaan secara langsung dan dapat diverifikasi melalui laporan posisi keuangan.

Berdasarkan penelitian Samsiah & Mashuri (2023), variabel ini diukur menggunakan nilai liabilitas sewa yang tersaji langsung di laporan posisi keuangan. Berdasarkan *pecking order theory* Myers (1984) dan *agency theory* Jensen & Meckling (1976), keputusan alokasi laba termasuk pembayaran dividen kas dipengaruhi oleh tekanan keuangan yang dihadapi manajemen. Implementasi PSAK 73 menyebabkan peningkatan liabilitas perusahaan yang berdampak pada struktur keuangan (Firmansyah dkk., 2023), sehingga berpotensi mempengaruhi kebijakan dividen kas perusahaan (Ratnasari & Purnawati, 2019).

$$\text{Implementasi PSAK 73} = \text{Nilai liabilitas sewa yang dilaporkan}$$

3.3.2 Variabel Dependen

3.3.2.1 Kebijakan Pembayaran Dividen Kas

Kebijakan pembayaran dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Hashmi dkk., 2020; Sejati dkk., 2020). Kebijakan pembayaran dividen

kas mencerminkan seberapa besar proporsi laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen kas, dan merupakan indikator penting dalam keputusan keuangan perusahaan (Sharma & Bansal, 2025). Kebijakan pembayaran dividen kas dipilih sebagai variabel dependen karena menjadi salah satu aspek yang diperkirakan terdampak oleh implementasi PSAK 73, yang mengubah perlakuan akuntansi terhadap sewa menjadi lebih transparan dan berdampak pada kebijakan pembayaran dividen. Perubahan dalam laporan keuangan akibat PSAK 73, khususnya terkait peningkatan liabilitas sewa dan *leverage*, dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan dalam membayar dividen.

Berdasarkan penelitian oleh Uqba & Hindasah (2025), variabel ini diukur menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu total dividen kas yang dibayarkan perusahaan terhadap laba bersih perusahaan dalam satu tahun buku. Rasio ini menggambarkan proporsi laba yang didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen kas.

$$DPR = \frac{Div}{NI} \times 100$$

Keterangan:

DPR : *Dividend Payout Ratio* (DPR)

Div : Jumlah dividen kas yang dibayarkan oleh perusahaan

NI : Laba bersih (*Net Income*) perusahaan

3.3.3 Variabel Moderasi

3.3.3.1 Tingkat *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya (Ratnasari & Purnawati, 2019) dan menjadi indikator krusial dalam menilai kesehatan finansial perusahaan (Abdullah & Sari, 2024). Dalam penelitian ini, tingkat *leverage* digunakan sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara implementasi PSAK 73 dan kebijakan dividen kas, sejalan dengan penelitian (Sharma & Bansal, 2025). Berdasarkan *pecking order theory*, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi menghadapi tekanan finansial yang lebih besar karena liabilitas menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan

pokok yang harus dipenuhi, sehingga ruang untuk mengalokasikan laba sebagai dividen kas menjadi semakin terbatas (Myers, 1984).

Pengukuran variabel *leverage* dalam penelitian ini akan menggunakan rasio keuangan yang mencerminkan proporsi utang terhadap modal perusahaan, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) yang membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan (Salman dkk., 2020). Rasio ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan dianalisis untuk menguji peran *leverage* sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi kekuatan hubungan antara implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas.

$$DER = \frac{TL}{TE} \times 100$$

Keterangan :

DER : Tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan
 TL : Total liabilitas perusahaan
 TE : Total ekuitas perusahaan

3.3.4 Variabel Kontrol

3.3.4.1 Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Menurut jumlah aset yang dimilikinya, ukuran suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar skala perusahaan tersebut (Santikah & Syahzuni, 2023).

Perusahaan besar akan memiliki kesempatan yang lebih mudah dalam mengakses pasar modal, sehingga berpeluang lebih baik untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham (Hashmi dkk., 2020). Di sisi lain, perusahaan kecil atau yang baru berdiri sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pasar modal, sehingga menghambat perusahaan dalam mendapatkan modal dan pinjaman, hal ini dapat berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membagikan dividennya (Hashmi dkk., 2020). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Ln total aset.

$$Ukuran\ perusahaan = Ln\ Total\ aset$$

3.3.4.2 Profitabilitas (ROA)

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki disebut profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA). ROA dimasukkan sebagai variabel kontrol karena memiliki hubungan positif signifikan dengan kebijakan dividen (Antono dkk., 2025), sejalan dengan *free cash flow hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk membagikan dividen kepada pemegang saham (Jensen, 1986).

$$ROA = \frac{NI}{TA} \times 100$$

Keterangan :

ROA : Tingkat *Return on Asset* (ROA) perusahaan
 NI : Laba bersih (*Net Income*) perusahaan
 TA : Total aset perusahaan

3.3.4.3 Cash Flow from Operation (CFO)

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai penerimaan maupun pengeluaran kas atau melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan operasi, kegiatan investasi dan pendanaan dalam jangka waktu tertentu. Arus kas yang paling penting untuk membiayai operasi bisnis adalah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen dan melakukan investasi baru atau ekspansi sendiri tanpa bergantung pada pembelanjaan dari luar, yaitu melalui pinjaman pihak ketiga atau penyeteroran modal baru dari pemilik (Siregar & Hasanah, 2019).

$$CFO = \frac{CFO}{TA} \times 100$$

Keterangan :

CFO : Arus kas operasi (*cash flow from operation*)
 TA : Total aset perusahaan

3.3.4.4 Pertumbuhan (GROWTH)

Pertumbuhan pendapatan (*revenue growth*) adalah nilai pertumbuhan pendapatan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Vinh, 2020). Temuan dari

Aditya & Fitria (2022) menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih menahan laba untuk membiayai ekspansi di masa depan daripada membagikannya sebagai dividen kepada pemegang saham. Variabel *growth* diletakkan sebagai variabel kontrol untuk mempertimbangkan pengaruh peluang pertumbuhan terhadap pembayaran dividen (Sharma & Bansal, 2025).

$$GROWTH = \frac{CI-PI}{PI} \times 100$$

Keterangan :

GROWTH : Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
 CI : Total pendapatan sekarang (*Current Income*)
 PI : Total pendapatan sebelumnya (*Previous Income*)

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, tabel berikut menyajikan definisi operasional variabel dan pengukurannya:

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Operasionalisasi

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran	Rujukan
1	Implementasi PSAK 73 (X)	Penerapan PSAK 73 sebagai perlakuan akuntansi baru terhadap sewa	<i>Nilai Liabilitas Sewa</i>	Samsiah & Saputri Mashuri (2023)
2	Kebijakan Pembayaran Dividen Kas (Y)	Kebijakan dividen kas untuk pembagian keuntungan kepada pemegang saham	$DPR = \frac{Div}{NI} \times 100$	Uqba & Hindasah (2025)
3	<i>Leverage</i> (Z)	Tingkat penggunaan utang oleh perusahaan	$DER = \frac{TL}{TE} \times 100$	Salman dkk., (2020)
4	Ukuran Perusahaan / <i>SIZE</i> (C1)	Skala atau besarnya perusahaan, yang ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki	<i>Ln Total Asset</i>	Sharma & Bansal (2025)

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran	Rujukan
5	Profitabilitas (C2)	Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang digunakan	$ROA = \frac{NI}{TA} \times 100$	Sharma & Bansal (2025)
6	<i>Cash Flow from Operation</i> (C3)	Informasi mengenai penerimaan serta pengeluaran kas pada aktivitas operasional	$CFO = \frac{CFO}{TA} \times 100$	Sharma & Bansal (2025)
7	Pertumbuhan (C4)	Pertumbuhan penjualan tahunan	$GROWTH = \frac{CI-PI}{PI} \times 100$	Sharma & Bansal (2025)

3.4 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan secara resmi. Sumber utama data adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan-perusahaan subsektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2020-2024. Laporan tersebut diakses melalui situs resmi BEI dan situs web masing-masing perusahaan. Selain itu, informasi tambahan yang mendukung analisis, seperti pemberitaan terkait implementasi PSAK 73, diperoleh dari media daring yang kredibel guna memperkaya pemahaman terhadap konteks dan dinamika yang terjadi selama periode penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan memanfaatkan bantuan alat uji berupa *software* IBM SPSS *statistic* 31 sebagai media dalam memudahkan peneliti melakukan olah data.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang telah dikumpulkan, tanpa melakukan penarikan kesimpulan bersifat *general*. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Elemen-elemen tersebut mencerminkan informasi penting, seperti nilai minimum yang menunjukkan observasi terendah, nilai maksimum sebagai observasi tertinggi, rata-rata sebagai ukuran pemusatan data, dan standar deviasi sebagai indikator variasi atau penyebaran data terhadap nilai tengah (*mean*). Analisis ini membantu peneliti memahami pola distribusi data dan tren statistik secara lebih komprehensif, serta memberikan dasar yang kuat sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap hubungan antar variabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan berfungsi sebagai alat estimasi yang tidak bias, maka dilakukanlah uji asumsi klasik. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi-asumsi dasar regresi, yaitu bahwa ada residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan tidak ada heteroskedastisitas (Najiyah & Idayati, 2021).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* untuk melakukan uji normalitas dalam menentukan apakah data residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Kriteria pengambilan keputusan berikut digunakan:

1. Jika nilai *p-value* ($p > 0,05$), maka dapat diinterpretasikan bahwa data berdistribusi normal.
2. Jika nilai *p-value* ($p < 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah ada hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Koefisien regresi yang tidak stabil dan sulit ditafsirkan dapat disebabkan oleh multikolinearitas yang tinggi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Sementara itu, apabila $tolerance < 0,1$ menandakan adanya masalah multikolinearitas pada data yang digunakan.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varian residual bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi model menjadi tidak efektif. Uji dilakukan menggunakan Uji Glejser, yang berarti mengubah nilai absolut residual terhadap variabel independen. Gejala heteroskedastisitas tidak ditemukan jika nilai signifikansi (*p-value*) lebih besar dari 0,05.

3.5.3 Robust Standard Error HC3

Penelitian ini menerapkan metode *Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator* tipe HC3 yang dikembangkan oleh (MacKinnon & White, 1985). Penggunaan HC3 bertujuan untuk memperkuat (*robustness*) validitas hasil uji statistik. HC3 dipilih karena terbukti memberikan estimasi yang lebih akurat pada sampel berukuran kecil hingga menengah ($n < 250$). MacKinnon & White (1985) menemukan bahwa HC3 menghasilkan ukuran uji yang paling mendekati nominal pada berbagai kondisi heteroskedastisitas, menjadikannya pilihan yang paling *robust* untuk sampel penelitian ini yang berjumlah 105 observasi. Penerapan HC3 memastikan bahwa kesimpulan uji T pada bab 4 memiliki tingkat ketangguhan (*robustness*) yang lebih tinggi terhadap berbagai kondisi distribusi data.

3.6 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Hasil uji F menunjukkan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Menurut Ghozali (2021), kriteria uji F menyatakan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 5% (0,05), maka model dianggap layak digunakan karena variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji koefisien determinasi ini memberikan penjelasan tentang seberapa besar variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai *R Square* berada dalam rentang 0 sampai 1, dimana semakin mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, nilai *R Square* yang mendekati 0 mengindikasikan bahwa variabel independen hanya sedikit mampu menjelaskan variasi variabel dependen dan sebagian besar variasi dipengaruhi oleh faktor lain di luar model (komponen error).

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji Hipotesis 1 (H1), yaitu untuk menganalisis dampak implementasi PSAK 73 sebagai variabel independen terhadap kebijakan pembayaran dividen kas sebagai variabel dependen dengan mengontrol variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, arus kas operasional, dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Model 1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DPR = \alpha + \beta_1 PSAK73 + \beta_2 SIZE + \beta_3 ROA + \beta_4 CFO + \beta_5 GROWTH + \varepsilon$$

Keterangan:

DPR : Kebijakan pembayaran dividen kas

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel implementasi PSAK 73

PSAK 73 : Implementasi PSAK 73

β_2	: Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan
<i>SIZE</i>	: Ukuran perusahaan
β_3	: Koefisien regresi variabel profitabilitas
ROA	: Profitabilitas
β_4	: Koefisien regresi variabel <i>cash flow from operation</i>
CFO	: <i>Cash flow from operation</i>
β_5	: Koefisien regresi variabel pertumbuhan pendapatan
<i>GROWTH</i>	: Pertumbuhan pendapatan
ε	: Error

3.8.2 Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian hipotesis kedua (H2) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi untuk mengevaluasi peran *leverage* perusahaan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas. Model interaksi ini mengacu pada Ghazali (2021). Model 2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DPR = \alpha + \beta_1 PSAK73 + \beta_2 DER + \beta_3 PSAK73 * DER + \beta_4 SIZE + \beta_5 ROA + \beta_6 CFO + \beta_7 GROWTH + \varepsilon$$

Keterangan:

DPR	: Kebijakan pembayaran dividen kas
α	: Konstanta
β_1	: Koefisien regresi variabel implementasi PSAK 73
PSAK 73	: Implementasi PSAK 73
β_2	: Koefisien regresi variabel <i>leverage</i>
DER	: <i>Leverage</i>
β_3	: Koefisien regresi variabel interaksi
PSAK 73*DER	: Variabel interaksi (implementasi PSAK 73* <i>leverage</i>)
β_4	: Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan
<i>SIZE</i>	: Ukuran perusahaan
β_5	: Koefisien regresi variabel profitabilitas
ROA	: Profitabilitas
β_6	: Koefisien regresi variabel <i>cash flow from operation</i>
CFO	: <i>Cash flow from operation</i>
β_7	: Koefisien regresi variabel pertumbuhan pendapatan
<i>GROWTH</i>	: Pertumbuhan pendapatan
ε	: Error

3.8.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji signifikansi parsial (uji T) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam model

regresi. Uji T merupakan metode pengujian hipotesis yang menentukan seberapa signifikan peran masing-masing variabel independen. Uji T menggunakan taraf signifikan 0,05 atau 5% untuk kriteria pengaruh signifikansi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini menganalisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas dengan menganalisis peran *leverage* sebagai pemoderasi hubungan negatif implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan pembayaran dividen kas. Dalam penelitian ini, digunakan 21 sampel perusahaan yang termasuk pada kategori subsektor ritel di BEI dengan waktu pengamatan selama lima tahun (2020-2024), sehingga didapatkan total sampel penelitian sebanyak 105 sampel. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengajukan dua hipotesis penelitian, hipotesis pertama (H1) diukur menggunakan analisis regresi linear berganda dan hipotesis kedua (H2) diukur menggunakan analisis *moderated regression analysis* (MRA). Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan simpulan berikut:

1. Berdasarkan hasil uji secara parsial, Hipotesis pertama (H1) terdukung. Hasil temuan ini menjawab bahwa nilai liabilitas sewa berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen kas. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai liabilitas sewa yang ditanggung perusahaan, terdapat kecenderungan penurunan pada jumlah dividen kas yang dibayarkan pada perusahaan subsektor ritel yang menjadi sampel penelitian ini. Temuan ini mendukung premis dari *pecking order theory* dan *agency theory* dalam konteks intensitas sewa yang tinggi pada subsektor ritel Indonesia.
2. Berdasarkan hasil uji secara parsial, Hipotesis kedua (H2) tidak terdukung. Hasil temuan ini menjawab bahwa tingkat *leverage* tidak terbukti memoderasi dampak implementasi PSAK 73 terhadap kebijakan

pembayaran dividen kas. Artinya, tingkat *leverage* perusahaan tidak memperkuat dampak negatif dari penerapan standar tersebut. Temuan ini memberikan perluasan kontribusi yakni pada hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas pendanaan internal yang kuat memungkinkan perusahaan untuk tetap membagikan dividen meskipun terjadi peningkatan liabilitas akibat aturan PSAK 73.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur ilmiah yang berlaku, namun demikian terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka agar dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi validitas temuan empiris yang dihasilkan, melainkan memberikan konteks yang lebih tepat dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini.

1. Penelitian ini membatasi sampel pada perusahaan subsektor ritel yang pernah membagikan dividen kas selama periode pengamatan 2020-2024. Penerapan kriteria ini, meskipun bertujuan untuk memastikan kelengkapan data dan konsistensi pengujian statistik, berimplikasi pada adanya bias pemilihan sampel. Perusahaan yang menghentikan pembayaran dividen sebagai respon terhadap tekanan finansial akibat implementasi PSAK 73 tidak tercakup dalam sampel ini. Dengan demikian, temuan H1 dalam penelitian ini mencerminkan besaran perubahan *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perusahaan yang tetap berkomitmen membagikan dividen, namun belum menggambarkan keseluruhan dampak PSAK 73 terhadap keputusan untuk membagikan atau meniadakan dividen di seluruh populasi ritel.
2. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data periode pasca implementasi PSAK 73, yaitu tahun 2020-2024. Desain penelitian ini tidak menggunakan data periode pra implementasi sebagai kelompok pembandingan, sehingga penelitian ini tidak dapat secara langsung mengidentifikasi perubahan akibat peralihan standar. Secara teknis, penelitian ini mengukur hubungan antara intensitas nilai liabilitas sewa

- dengan kebijakan dividen pada periode post implementasi, bukan membandingkan perilaku dividen sebelum dan sesudah PSAK 73 berlaku.
3. Pengukuran implementasi PSAK 73 dalam penelitian ini menggunakan nilai nominal liabilitas sewa yang tersaji di laporan posisi keuangan. Penggunaan nilai nominal tanpa mempertimbangkan akun lain yang juga terdampak berpotensi mengandung bias, dengan perusahaan yang berskala besar secara otomatis memiliki nilai liabilitas sewa yang lebih tinggi bukan karena intensitas ketergantungan sewa yang lebih besar, melainkan semata-mata karena skala operasionalnya.
 4. Variabel moderasi *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam penelitian ini dihitung berdasarkan total liabilitas perusahaan yang di dalamnya melekat komponen liabilitas sewa. Kondisi ini menyebabkan variabel independen (liabilitas sewa) dan variabel moderasi (DER) tidak sepenuhnya independen satu sama lain, sehingga terdapat potensi ketumpangtindihan diantara keduanya. Penelitian mendatang disarankan menggunakan *adjusted DER* yang dihitung dari total liabilitas di luar komponen sewa, sehingga pengaruh murni *leverage* non sewa terhadap hubungan PSAK 73 dan kebijakan dividen dapat diidentifikasi dengan lebih akurat.
 5. Penelitian ini menggunakan metode *regresi pooled OLS* dengan koreksi *robust standard error* HC3 untuk memperkuat model. Meskipun pendekatan ini secara statistis valid, struktur data penelitian ini juga tepat jika dianalisis menggunakan model data panel seperti *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang mampu mengendalikan *unobserved heterogeneity* antar perusahaan. Keterbatasan ini disebabkan oleh penggunaan perangkat lunak SPSS yang memiliki keterbatasan dalam estimasi model data panel.
 6. Periode pengamatan penelitian ini dimulai pada tahun 2020, yang secara bersamaan merupakan tahun berlakunya PSAK 73 sekaligus tahun terdampaknya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Meskipun variabel kontrol profitabilitas (ROA) dan pertumbuhan pendapatan (GROWTH) diharapkan dapat menangkap sebagian dampak

operasional pandemi, penelitian ini tidak secara eksplisit memisahkan dampak PSAK 73 dari pengaruh pandemi melalui desain penelitian formal seperti penambahan variabel *dummy* tahun atau pendekatan *difference in differences*. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari variasi DPR yang diamati pada tahun 2020-2021 mencerminkan respon perusahaan terhadap ketidakpastian pandemi, bukan hanya respon terhadap implementasi PSAK 73.

5.3 Saran

Merujuk pada berbagai keterbatasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti mendatang:

1. Penelitian mendatang dapat menggunakan regresi logistik atau model tobit yang dapat memodelkan kemungkinan perusahaan berhenti membayar dividen sebagai respon terhadap PSAK 73, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat atas dampak PSAK 73 terhadap kebijakan dividen di seluruh perusahaan ritel.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk menerapkan desain *Difference in Differences* (DiD) dengan membandingkan kelompok perusahaan ritel berintensitas sewa tinggi (kelompok perlakuan) dan perusahaan berintensitas sewa rendah (kelompok kontrol), baik sebelum maupun sesudah implementasi PSAK 73. Pendekatan ini diharapkan dapat mengisolasi dampak kebijakan standar akuntansi baru secara lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan proksi *lease intensity ratio* sebagai pengukuran implementasi PSAK 73 yang lebih proporsional.
4. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan *adjusted* DER yang mengecualikan komponen liabilitas sewa dari total liabilitas untuk menghindari ketumpangtindihan antara variabel independen dan moderasi.
5. Penelitian mendatang disarankan menggunakan perangkat lunak Stata atau EViews dan menerapkan model data panel (FEM/REM) disertai uji Hausman untuk memilih spesifikasi model yang tepat, sehingga masalah *unobserved heterogeneity* antar perusahaan dapat dikendalikan secara lebih baik.

6. Keterbatasan terkait dampak COVID-19 dapat diatasi dengan mengestimasi ulang model secara terpisah untuk sub periode pandemi (2020-2021) dan sub periode pemulihan (2022-2024), atau dengan menggunakan kelompok kontrol berupa perusahaan non ritel dengan intensitas sewa rendah yang tidak terdampak signifikan oleh PSAK 73.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Sari, M. P. S. (2024). The Role of Student Engagement in Mediating Learning Motivation and Learning Discipline on Economic Learning Outcomes. *Business and Accounting Education Journal*, 5(1), 108-130. <https://doi.org/10.15294/baej.v5i1.3509>
- Aditya, D., & Fitria, A. (2022). Pengaruh Collateralizable Assets, Likuiditas Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(7).
- Afandi, M. N., & Soekotjo, H. (2020). Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Likuiditas dan Leverage Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 9(6).
- Akbar, K. P., Taufik, T., & Saputri, N. D. M. (2025). Effects of Free Cash Flow, Collas, Leverage on Dividend Policy in LQ45 Companies, Indonesia. *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 35-49. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v13i1.4820>
- Antono, A. D., Karnila Ali, & Sri Retnaning Rahayu. (2025). Analisis Pengaruh Return On Asset Dan Return On Equity Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia Periode 2021. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 5(1), 17-26. <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v5i1.4362>
- Aprilia, V. A., Anggraini, N., & Yani, A. (2023). Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(1), 34-48. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5689>
- Bäuerle, N., & Jaśkiewicz, A. (2017). Optimal dividend payout model with risk sensitive preferences. *Insurance: Mathematics and Economics*, 73, 82-93. <https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2017.01.006>
- Benitto, J. (2025). Perbandingan PSAK 30 dan PSAK 73 Mengenai Sewa Aset Tetap dalam Penerapannya terhadap Rasio Keuangan pada PT. AA. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(3), 467-479. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i3.32019>

- Bohusova, H., Svoboda, P., & Veverkova, A. (2022). Impact of New Lease Reporting on Retailing and Wholesale Companies. *Montenegrin Journal of Economics*, 18(3), 89-98. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2022.18-3.7>
- Botiraliyeva, Y. M. (2025). Lease Accounting Transformation under IFRS 16: Recognition and Reporting Changes. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.10801>
- Ertugrul, M., & Demir, V. (2021). The Impact of IFRS Adoption on Information Asymmetry: Evidence from Takeovers. Dalam T. Aksoy & U. Hacioglu (Ed.), *Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era* (hlm. 105-124). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72628-7_5
- Estuti, E. P., Hendrayanti, S., & Fauziyanti, W. (2020). Analisis Likuiditas, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan. *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 114-126. <https://doi.org/10.33747/capital.v2i1.34>
- Falavigna, G., & Ippoliti, R. (2021). Financial Constraints and the Sustainability of Dividend Payout Policy. *Sustainability*, 13(11), 6334. <https://doi.org/10.3390/su13116334>
- Fathony, H. R., Aldi, M. F., & Sumarno, R. A. (2025). Faktor-Faktor Penentu Kebijakan Dividen pada Perusahaan Keuangan ASEAN-5. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(2), 211-226. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i2.8116>
- Firaz, R., Benedictus, S., & Firmansyah, A. (2022). Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan, Book Tax Difference Dan Penghindaran Pajak. *Educoretax*, 2(1), 60-74. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.159>
- Firmansyah, A., Elisabeth, E., & Trisnawati, E. (2023). Indonesia's Capital Structure And Company Profitability Before And After The Implementation Of PSAK 73. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(1), 73-85. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1127>
- Gamalasari, D., & Wardhani, N. K. (2024). Analisis Dampak Implementasi PSAK 73 Bagi Lessee dan Lessor. *Owner*, 8(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2262>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10) [19]. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ginting, A. P., Permana, M. D. C., & Firmansyah, A. (2023). Penerapan PSAK 73 atas Profitabilitas, Struktur Modal dan Tangibility pada Perusahaan. *Studi*

Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 5(2), 259.
<https://doi.org/10.21632/saki.5.2.259-273>

- Guerreiro, M. S., Lima Rodrigues, L., & Craig, R. (2021). Institutional theory and IFRS: An agenda for future research. *Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 50(1), 65-88. <https://doi.org/10.1080/02102412.2020.1712877>
- Hanifah, F., Widiastuti, E., & Najmudin, N. (2024). The Effect of Tax Avoidance, Profitability, and Leverage on Dividend Policy: Liquidity as Moderating Variable. *Marginal Journal of Management Accounting General Finance and International Economic Issues*, 3(2), 376-387. <https://doi.org/10.55047/marginal.v3i2.913>
- Hariyanti, N., & Pangestuti, I. R. D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Collateralizable Assets, dan Growth in Net Assets terhadap Kebijakan Dividen dengan Firm Size, Firm Age, dan Board Size sebagai variabel Kontrol (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019). *Diponegoro Journal of Management*, 10(3), 10-24.
- Hashmi, S. D., Gulzar, S., Ghafoor, Z., & Naz, I. (2020). Sensitivity of firm size measures to practices of corporate finance: Evidence from BRICS. *Future Business Journal*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s43093-020-00015-y>
- Heryana, D., Dewi, S., & Firmansyah, A. (2023). Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Nilai Perusahaan Di Indonesia: Aset Hak Guna Dan Utang Sewa. *Jurnalku*, 3(2), 128-136. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.382>
- Hidayat, R. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i2.15406>
- Holloway, C. J., & Singh, N. R. (2025). The Effect of IFRS 16 on Corporate Lease Accounting in Australia. *Journal of World Economy*, 4(2), 23-29. <https://doi.org/10.56397/JWE.2025.04.04>
- Hoogervorst, H. (2016). Shining the light on leases. *IFRS Foundation*.
- IAI. (2017). Pengesahan PSAK 73: Sewa dan Draf Eksposeur ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- IAI. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 116: Sewa. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI*.

- IAI. (2021). PSAK 73: SEWA. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- IAI. (2022). Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*.
- IAI. (2017). IFRS 16 Leases. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- IASB. (2016). Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases (IFRS 16). *IFRS Foundation*.
- IASB. (2016). IFRS 16 leases Effects analysis. International Accounting Standards Board. *IFRS Foundation*.
- Ifada, L. M. & Nurcahyono. (2023). Determinants of Dividend Policy: Evidence from Indonesian Stock Exchange. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 13-23. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v9i1.2886>
- Ihsannuddin, F., Kristianingsih, K., & Hazma, H. (2022). Analisis Determinan Kebijakan Dividen Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 611-621. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3736>
- Jayanti, F. D. (2022). Pengaruh Penerapan IFRS 16 (Sewa) terhadap Rasio Keuangan dan Keputusan Investasi pada Perusahaan Retail. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEMA) Universitas Ngudi Waluyo*, 3(1), 49-56.
- Jensen, M. C. (1986). Agency Cost Of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.99580>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jehuru, M. S. A., & Amanah, L. (2022). Pengaruh Arus Kas Operasi, Laba Bersih dan Investment Opportunity Set terhadap Dividen Kas. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Kartika Dewi, N. P. I., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 3028. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i05.p16>
- Keown, A. J., Scott Jr, D. F., Martin, J. D., & Petty, J. W. (2000). *Dasar-dasar manajemen keuangan (C.D. Djakman & D. Sulistyorini, Penerj.; Buku 2)*. Salemba Empat.

- Kontan, .co.id. (2020). Penjualan MAP Active turun 3,4% pada kuartal I-2020 akibat pandemi Covid-19. <https://industri.kontan.co.id/news/penjualan-map-active-turun-34-pada-kuartal-i-2020-akibat-pandemi-covid-19>
- KPMG. (2016). IFRS 16 Leases. *KPMG Internasional*.
- Kristin, M., Leon, F. M., & Purba, Y. E. (2021). Faktor – Faktor Penentu Kebijakan Pembayaran Dividen Pada Industri Non Keuangan di Indonesia dan Australia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(2), 101-114. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.2.101-114>
- Kurniawan, D., & Kristamurti, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Dividend Payout Ratio pada Emiten Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v17i1.1956>
- Lailiyah, E. H., & Abadi, M. D. (2021). Agency Cost dan Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(1), 33-41. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i1.4302>
- Laksana, M. P., & Sudradjat, S. (2019). Analisis Proyeksi Laporan Keuangan Perusahaan Penerbangan Saat Transisi PSAK 30 Menjadi PSAK 73. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(3), 369-378. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i3.296>
- Lau, C. K. (2023). The economic consequences of IFRS 16 adoption: The role of gearing restriction in debt covenants. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(3), 464-482. <https://doi.org/10.1108/JAAR-08-2021-0208>
- Liao, W.J., Lin, Y.E., Li, X.Z., & Chih, H.H. (2022). The Effects of Behavioral Foundations and Business Strategy on Corporate Dividend Policy. *Frontiers in Psychology*, 13, 849238. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.849238>
- MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305-325. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)
- Madyoningrum, A. W. (2019). Pengaruh Firm Size, Leverage dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.26905/jbm.v6i1.3034>
- Maiyo, R., Cheboi, J., & Limo, P. (2025). Accounting Conservatism as a Protective Mechanism: Exploring Its Impact on the Relationship Between

Financial Decisions and Likelihood of Financial Distress among Listed Firms in Kenya. *SEISENSE Journal of Management*, 8(1), 36-58. <https://doi.org/10.33215/v9y9ph37>

Malik, N., & Kashiramka, S. (2025). Unlocking Dividend Potential Through the Power of Sustainable Disclosures: Moderating Role of Financial Constraints. *Business Strategy and the Environment*, 34(3), 3086-3113. <https://doi.org/10.1002/bse.4139>

Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). The Implementation of the Accounting Standards PSAK 73 Leases to the Financial Performance of Companies Listed on the Stock Exchange. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 10(1), 26-43. <https://doi.org/10.30591/monex.v10i1.2177>

Maulana, J., & Satria, M. R. (2021). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 169-178. <https://doi.org/10.17509/jpak.v9i2.37204>

Mauris, F. I., & Rizal, N. A. (2021). The Effect of Collaterallizable Assets, Growth in Net Assets, Liquidity, Leverage and Profitability on Dividend Policy (Case Studies on Non-Financial Services Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 937-950. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1695>

Mihalciuc, C. C. (2019). Accounting and Recognizing Leasing Contracts in Financial Reports. *European Journal of Accounting, Finance & Business*, 7(1). <https://doi.org/10.4316/EJAFB.2019.712>

Morales Díaz, J., Villacorta Hernández, M. Á., & Iulia Voicila, F. (2019). Lease accounting: An inquiry into the origins of the capitalization model. *De Computis, Revista Española de Historia de La Contabilidad.*, 16(2), 160-187. <https://doi.org/10.26784/issn.1886-1881.v16i2.357>

Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2018). The Impact of IFRS 16 on Key Financial Ratios: A New Methodological Approach. *Accounting in Europe*, 15(1), 105-133. <https://doi.org/10.1080/17449480.2018.1433307>

Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle [No. W1393]. *National Bureau of Economic Research*. <https://doi.org/10.33386/w1393>

Najiyah, A., & Idayati, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).

- Neraca, .co.id. (2020). Laba Mitra Adiperkasa Terkoreksi 83,63%. <https://www.neraca.co.id/article/133394/laba-mitra-adiperkasa-terkoreksi-8363>
- Nomorissa, T. A., & Lindrawati. (2021). Penerapan PSAK 73 terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Jasa di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana (JRAMB)*, 7(2). <https://doi.org/10.26486/jramb.v7i2.1757>
- Pamungkas, M. A., Alfiansah, R., Nahdawi, M., & Uzliawati, L. (2024). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Profitabilitas, Struktur Modal, dan Tingkat Tangibilitas Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik. *Jesya, (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1301-1313. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1621>
- Park, S. Y., & Park, S. Y. (2022). Information Shock and Dividend Policy in Family-controlled Firms: Evidence from Korea. *Emerging Markets Finance and Trade*, 58(6), 1771-1793. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1926234>
- Park, Y., & Na, K. (2017). The Effects of Listing Status on a Firm's Lease Accounting: Evidence from South Korea. *Gajah Mada International Journal of Business, Vol. 19, No. 1*, 77-92.
- Permata, I. D., & Andriani, A. F. (2021). Bagaimana Dampak PT Citilink Indonesia Dalam Menerapkan PSAK 73 Tentang Sewa? *Jurnalku*, 1(3), 210-221. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46>
- PwC. (2016). A study on the impact of lease capitalisation. *PwC (PricewaterhouseCoopers)*. <https://www.pwc.com/sk/en/audit/assets/2017/a-study-on-the-impact-of-lease-capitalisation.pdf>
- PwC Indonesia. (2019). PSAK 73 Leases. *PricewaterhouseCoopers Indonesia*.
- PwC Indonesia. (2020). State of Readiness. *PwC (PricewaterhouseCoopers) Indonesia*. <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/state-of-readiness.pdf>
- Qomariyah, A., & Sukoco, Y. D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JRMA)*, 9(3), 179-191.
- Rahmawati, S. (2021). Penerapan PSAK 73 pada Perusahaan Pertambangan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2019. *Jurnalku*, 1(1), 15-29. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.19>

- Ratnasari, P. S. P., & Purnawati, N. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6179. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i10.p16>
- Rizaldi, F., & Munandar, A. (2025). Menyingkapi Penerapan PSAK 116 Terhadap Rasio Keuangan Berbasis Kemampuan Bayar: Studi Kasus Pada PT Mitra Adiperkasa Tbk. *KOMPAK (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi)*, 18(1). <https://doi.org/10.51903/f7dssp68>
- Rochmawati, Z., & Yuniningsih, Y. (2022). Profitabilitas Memediasi Likuiditas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(3), 327-338. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i3.68>
- Rohov, H., Kolodiziev, O., Shulga, N., Krupka, M., & Riabovolyk, T. (2020). Factors affecting the dividend policy of non-financial joint-stock companies in Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(3), 40-53. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(3\).2020.04](https://doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.04)
- Sabrina, S., & Challen, A. E. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73 Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Pundi*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.439>
- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 955-964). <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1447>
- Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The Impact of PSAK 73 Implementation on Leases in Indonesia Telecommunication Companies. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 2360-2373. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i3.2804>
- Salman, I., Firmansyah, A., & Widyaningrum, M. R. (2020). Peran Leverage sebagai Pemoderasi: Revaluasi Aset Tetap, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 171-190. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7810>
- Samsiah, & Mashuri, A. A. (2023). Penerapan Kapitalisasi Sewa Terhadap Manajemen Laba. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 327-352. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16509>

- Santikah, A., & Syahzuni, B. A. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Dividen Tunai. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3575>
- Segal, M., & Naik, G. (2019). The expected impact of the implementation of International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 - Leases. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.4102/jef.v12i1.207>
- Sejati, F. R., Ponto, S., Prasetianingrum, S., Sumartono, S., & Sumbari, N. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 110. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.21480>
- Shabrina, W. & Hadian, Niki. (2021). The influence of current ratio, debt to equity ratio, and return on assets on dividend payout ratio. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(3), 193-204. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i3.221>
- Shafai, N. A. S., Nassir, A. Md., Kamarudin, F., Rahim, N. A., & Ahmad, N. H. (2019). Dynamic Panel Model of Dividend Policies: Malaysian Perspective. *Contemporary Economics*, 13(3), 239-252. <https://doi:10.5709/ce.1897-9254.310>
- Sharma, A., & Bansal, M. (2025). Impact of IFRS 16 on dividend payout: Evidence from India. *Asian Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ara-09-2024-0289>
- Sianipar, J. M. (2020). The Effect of Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), and Growth Assets on Dividend Policy in Consumer Goods Manufacturing Companies Which is Listed in the Stock Exchange Indonesia 2015-2017 Period. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(02), 175-184. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i02.588>
- Silviana, H., & Mahirun, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 20(2), 165-178. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v20i2.3559>
- Singh, G. (2024). Dividend policy adjustments under bankruptcy law: Insights from distressed firms. *Finance Research Letters*, 70, 106253. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106253>
- Simon, F., Mutiara, W., Pramono, S. F., & Tanuwijaya, P. (2025). Analisis Dampak Implementasi PSAK 116 pada Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1274-1286. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5165>

- Siregar, S. R., & Hasanah, U. (2019). Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Dividen Kas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015). *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(1), 63-72. <https://doi.org/10.36555/jasa.v3i1.460>
- Slater, P. J., Greenfield, A., Godfrey, E., & Policastro, F. (2024). Losing altitude: The impact of new leasing standards on the liquidity, leverage, profitability and valuation of U.S. and European airlines. *Journal of Air Transport Management*, 117, 102594. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2024.102594>
- Stancheva-Todorova, E., & Velinova-Sokolova, N. (2019). IFRS 16 Leases and Its Impact on Company's Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics. *Economic Alternatives*, (1), 44-62. <https://doi.org/10.37075/EA.2019.1.04>
- Sudrajat, A., Ronauli, D., & Octavia, E. (2021). Factors Affecting Dividend Policies in Property and Real Estate Sector Companies. *Psychology and Education*, 58(1), 6150-6154.
- Sugiarto, G. A., & Dinarjito, A. (2022). Analisis Penerapan PSAK 73 Pada PT XYZ. *Jurnalku*, 2(2), 130-139. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i2.153>
- Susanti, M., Ardana, I. C., Sufiyati, & Dewi, S. P. (2021). The Impact of IFRS 16 (PSAK 73) Implementation on Key Financial Ratios: An Evidence from Indonesia. In *Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.045>
- Susiani, R. (2021). Implementation Of Psak 73 Leases and Its Impact on Company's Financial Performance (Case Study at Pt X Bandung). *Rigeo*, 11(3).
- Taleb, L. (2019). Dividend Policy, Signaling Theory: A Literature Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3359144>
- Tijjani, A. A., & Bello, M. S. (2019). Corporate Ownership And Dividend Policy: Agency Theory Perspectives. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies*, 6(7), 90-96.
- Tran, D. V. (2020). Bank Dividend Policy and Degree of Total Leverage. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 53-64. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO2.53>
- Uqba, L. A., & Hindasah, L. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Leverage, Assets Growth, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional

Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(1), 257-269. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i1.2939>

Utami, S. E., & Gumanti, A. T. (2019). Analysis of cash dividend policy in Indonesia stock exchange. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 97-105. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.10](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.10)

Vinh, N. T. (2020). Impact of Overconfident CEO on Dividend Policy: Evidence in Eterprises Listed on Hose of Vietnam. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26(1), 1-8.

Wahjudi, E. (2020). Factors affecting dividend policy in manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. *Journal of Management Development*, 39(1), 4-17. <https://doi.org/10.1108/JMD-07-2018-0211>

Wiyanto, D. A. P., & Artini, L. G. S. (2024). Pengaruh Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Dividen. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 415-427. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5764>